

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PENINGKATAN KEMAMPUAN INFORMASI GUNA
MENCEGAH DISINFORMASI DALAM RANGKA
MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL
SINGAPURA**

Oleh:

**WONG MINGJIE, M.M.D.S.
KOLONEL, SINGAPURA**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGGARAN (PPRA) LXV
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV tahun 2023, telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul:

“PENINGKATAN KEMAMPUAN INFORMASI GUNA MENCEGAH DISINFORMASI DALAM RANGKA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL SINGAPURA”

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXV tahun 2023 untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Bapak Gubernur Lemhannas RI Bapak Andi Widjajanto** yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA LXV di Lemhannas RI Tahun 2023.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Panglima Angkatan Bersenjata Singapura, Vice Admiral (VADM) Aaron Beng**, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA LXV di Lemhannas RI Tahun 2023.

Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau **Tutor Taskap kami yaitu MAYJEN TNI Rido Hermawan, M.Sc.** dan **Tim Penguji Taskap** serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Allah SWT, Tuhan YME senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, 15 Agustus 2023

Penulis Taskap



WONG MINGJIE

KOLONEL, SINGAPURA



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wong Mingjie
Pangkat : Kolonel
Jabatan : Kepala Pusat Informasi Angkatan Udara Singapura
Instansi : Angkatan Bersenjata Singapura
Alamat : 336 Pasir Panjang Road, Singapore 118668

2. Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXV tahun 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

3. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 15 Agustus 2023

Penulis Taskap



WONG MINGJIE

KOLONEL, SINGAPURA

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

1. Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : KOLONEL Wong Mingjie
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke
LXV Tahun 2023
Judul Taskap : **“PENINGKATAN KEMAMPUAN INFORMASI
GUNA MENCEGAH DISINFORMASI DALAM
RANGKA MEMPERKUAT KETAHANAN
NASIONAL SINGAPURA”**

2. Taskap tersebut diatas telah ditulis “sesuai / ~~tidak sesuai~~” dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 24 Tahun 2022, karena itu “layak / ~~tidak layak~~” dan “disetujui / ~~tidak disetujui~~” untuk di uji.

“” Coret yang tidak diperlukan.

Jakarta, 15 Agustus 2023
Tutor Taskap



MAYJEN TNI Rido Hermawan. M.Sc
Tajar Bidang PADNAS

Lemhannas RI

DAFTAR ISI

PENINGKATAN KEMAMPUAN INFORMASI GUNA MENCEGAH DISINFORMASI DALAM RANGKA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL SINGAPURA

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
GLOSARIUM	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	7
5. Metode dan Pendekatan	9
6. Pengertian	9
BAB II. LANDASAN PEMIKIRAN	
7. Umum	12
8. Paradigma Nasional	13
9. Peraturan Perundang-Undangan dan Kelembagaan	14
10. Data dan Fakta	18
11. Kerangka Teoritis.....	19
12. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh – Eksternal	26
13. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh – Internal	29

BAB III. PEMBAHASAN	
14. Umum	36
15. Optimalisasi Peraturan Perundang-Undangan Dan Perangkat Hukum untuk Mendukung Penguatan Dan Pengembangan Kemampuan Informasi.....	37
16. Optimalisasi Instansi Operasional Utama Yang Telah Dibentuk Untuk Berkontribusi Pada Pengembangan Kemampuan Informasi Yang Optimal.....	43
17. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Di Bidang Informasi.....	48
18. Peningkatan Kesadaran Dan Pendidikan Tentang Disinformasi Untuk Masyarakat Umum.....	52
19. Optimalisasi Kerja Sama Antar Para Pemangku Kepentingan Dalam Penggunaan Dan Keamanan Informasi.....	58
20. Mengadopsi Kerangka Kerja “Merasakan, Menghalangi, Berkolaborasi”: (Sense, Deter, Collaborate).....	62
BAB IV. PENUTUP	
21. Simpulan	65
22. Rekomendasi	66
DAFTAR PUSTAKA	I
DAFTAR LAMPIRAN:	
A. ALUR PIKIR	A-1
B. DAFTAR TABEL	B-1
C. DAFTAR GAMBAR	C-1
D. PENGERTIAN	D-1
E. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	E-1

DAFTAR TABEL

	<u>Halaman</u>
TABEL B-1: UNDANG-UNDANG BERITA PALSU DI SELURUH DUNIA (PER JANUARI TAHUN 2018)	B-1
TABEL B-2: TINDAKAN YANG DIPRAKARSAI PEMERINTAH TERHADAP BERITA PALSU (PER JANUARI TAHUN 2018)	B-1



DAFTAR GAMBAR

	<u>Halaman</u>
GAMBAR 1: KERANGKA ANALISIS UNTUK KETAHANAN NASIONAL SINGAPURA	24
GAMBAR 2: KEMITRAAN 5 SISI (<i>PENTA-HELIX INFO-PARTNERSHIP</i>)	47
GAMBAR 3: STRATEGI JANGKA PANJANG, NAMA “MERASAKAN, MENGHALANGI, BERKOLABORASI” (<i>SENSE, DETER, COLLABORATE</i>)	63



GLOSARIUM

(Daftar Singkatan Kata)

AMRI	<i>ASEAN Ministers' Responsible for Information</i> (Menteri ASEAN Bertanggung Jawab atas Informasi)
AMS	<i>ASEAN Member States</i> (Negara Anggota ASEAN)
CDI	<i>Chief of Digital and Intelligence Service</i> (Kepala Dinas Digital dan Intelijen)
CECA	<i>Comprehensive Economic Cooperation Agreement</i> (Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif)
COS-DS	<i>Chief of Staff - Digital and Intelligence Staff</i> (Kepala Staf – Staf Digital dan Intelijen)
CSA	<i>Cyber Security Agency</i> (Badan Keamanan Siber)
CXDI	<i>Chief Expert DIS</i> (Kepala Ahli DIS)
DCO	<i>Defence Cyber Organisation</i> (Organisasi Pertahanan Siber)
DIS	<i>Digital and Intelligence Service</i> (Layanan Digital dan Intelijen)
FICA	<i>Foreign Interference (Countermeasures) Act 2021</i> [UU Interferensi Asing (Penanggulangan) Tahun 2021]
FTA	<i>Free Trade Agreements</i> (Perjanjian Perdagangan Bebas)

GTI	<i>Global Terrorism Index</i> (Indeks Terorisme Global)
HIC	<i>Hostile Information Campaigns</i> (Kampanye Informasi Bermusuhan)
ICT	<i>Info-Comm Technology</i> (Teknologi Komunikasi Informasi)
IMD	<i>International Institute for Management Development</i> (Institut Internasional untuk Pengembangan Manajemen)
IMDA	<i>Infocomm Media Development Authority</i> (Otoritas Pengembangan Media InfoKomm)
MCI	<i>Ministry of Communications & Information</i> (Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura)
MINDEF	<i>Ministry of Defence</i> (Kementerian Pertahanan Singapura)
MLC	<i>Media Literacy Council</i> (Dewan Literasi Media)
MHA	<i>Ministry of Home Affairs</i> (Kementerian Dalam Negeri)
MOE	<i>Ministry of Education</i> (Kementerian Pendidikan)
MOM	<i>Ministry of Manpower</i> (Kementerian Tenaga Kerja)
MOU	<i>Memorandum of Understanding</i> (Nota Kesepahaman)
NATO StratCom COE	<i>NATO Strategic Communications Centre of Excellence</i> (Komunikasi Strategis Pusat Keunggulan NATO)

NLB	<i>National Library Board of Singapore</i> (Dewan Perpustakaan Nasional Singapura)
NTU	<i>Nanyang Technological University</i> (Universitas Teknologi Nanyang)
PA	<i>People's Association</i> (Paguyuban Rakyat)
PAP	<i>People's Action Party</i> (Partai Aksi Rakyat)
PMET	<i>Professional, Managerial, Executive, and Technical</i> (Profesional, Manajer, Eksekutif, dan Teknisi)
POFMA	<i>Protection Against Online Falsehoods and Manipulation Act</i> (UU Perlindungan Dari Kepalsuan Online dan Manipulasi Tahun 2019)
SAF	<i>Singapore Armed Forces</i> (Angkatan Bersenjata Singapura)
SPF	<i>Singapore Police Force</i> (Kepolisian Singapura)
TD	<i>Total Defence</i> (Pertahanan Total)

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dengan globalisasi dan transformasi digital, lingkungan operasi saat ini menjadi semakin menantang. Transformasi digital berlangsung sangat cepat di banyak negara, menawarkan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan melalui peningkatan produktivitas dan peningkatan pemberian layanan di berbagai sektor utama, termasuk keuangan, kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Komunikasi daring dan platform media sosial yang dibawa oleh transformasi digital telah menjadi kebutuhan penting dalam hidup kita, berfungsi sebagai alat untuk memajukan globalisasi, konektivitas, dan kebebasan berbicara. Dengan Transformasi Digital, penggunaan internet di dunia meningkat secara signifikan dari 2,18 miliar pada tahun 2012 menjadi 4,95 miliar pada tahun 2022. Ini adalah sekitar 62,5% dari populasi dunia. Demikian pula, media sosial memiliki sekitar 4,62 miliar pengguna.¹ Tingkat penetrasi internet global juga meningkat dari hampir 17% pada tahun 2005 menjadi lebih dari 53% pada tahun 2019. Hal ini membawa manfaat sekaligus tantangan bagi dunia. Penyebaran berita palsu dan disinformasi daring dan luring menimbulkan ancaman bagi kesejahteraan individu, lembaga demokrasi, dan masyarakat di seluruh dunia.

Peristiwa terbaru seperti pandemi Covid-19, serangan terhadap United States Capitol Building pada tahun 2021, perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022, dan pemilihan presiden Filipina pada tahun 2022, konsekuensi berbahaya dari disinformasi dan berita palsu dapat dilihat pada menjamurnya kelompok anti-vaksin di Facebook, kurangnya kepercayaan pada ilmu perubahan iklim, dan meningkatnya radikalisme dan polarisasi dalam demokrasi. Secara umum, maksud dari disinformasi adalah untuk melemahkan kepercayaan pada institusi yang sah dan proses demokrasi dan memperdalam garis kesalahan masyarakat melalui keyakinan yang mengakar dan menumbangkan nilai-nilai masyarakat (Jayakumar et al., 2021). Raksasa teknologi termasuk *Facebook*, *Twitter* dan *Google* sangat

¹ Digital 2022: Another Year of Bumper Growth. *We are Social*. URL: <https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/>

prihatin dengan masalah disinformasi dan berita palsu yang mereka hadapi, belakangan ini, mengkomunikasikan berbagai tindakan untuk melawan penyebaran disinformasi.² Oleh karena itu, disinformasi memiliki ancaman tingkat nasional bagi banyak negara, dan bahkan ancaman global.

Sebagai negara kecil, kelangsungan hidup dan kesuksesan Singapura merupakan studi kasus yang menarik dalam isu-isu seperti pembangunan ekonomi, kerukunan rasial, pembangunan bangsa dan diplomasi pertahanan. Dengan luas daratan kurang lebih 720 km² dan jumlah penduduk sekitar 5,69 juta jiwa, Singapura adalah tempat peleburan orang dan budaya, dengan beragam ras dalam populasinya. Menurut Departemen Statistik Singapura, 74,3% populasi adalah ras Cina, 13,5% adalah Melayu, 9% adalah etnis India dan 3,2% dari populasi adalah ras lain.³ Karena Singapura adalah negara sekuler, Singapura juga memiliki berbagai agama yang berbeda. 31,1% penduduk beragama Buddha, 15,6% Muslim, 8,8% Tao, 18,9% Kristen, 5% Hindu, 0,6% agama lain, dan 20% penduduk tanpa agama (Lihat Gambar C-1 di Lampiran C).⁴ Dari 5,69 juta penduduknya, 4,04 juta adalah warga negara Singapura atau penduduk tetap. Ini berarti bahwa penduduk lainnya adalah orang asing. Tanpa sumber daya alam, dan penduduk yang beragam ras dan agama, sungguh suatu keajaiban, sejak kemerdekaannya 58 tahun yang lalu pada tahun 1965, Singapura telah meraih banyak prestasi di kancah global. Singapura telah memantapkan dirinya sebagai pusat global dan keuangan yang kuat, dan berada di peringkat ke-3 dalam 2022 Institut Internasional untuk Pengembangan Manajemen (*International Institute for Management Development: IMD) World Competitiveness Ranking* tepat di belakang Denmark dan Swiss.⁵ Singapura juga menempati peringkat ke-8 PDB per modal tertinggi di dunia, mengungguli negara-negara seperti Australia, Jerman dan Inggris.⁶

² The Straits Times, "Facebook and Google move to Tackle Fake News", 8 Apr 2017.

³ Department of Statistics, Singapore. 2021.

URL: <https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/publications/cop2020/sr1/findings.pdf>

⁴ Department of Statistics, Singapore. 2021.

URL: <https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/publications/cop2020/sr1/findings.pdf>

⁵ 2022 Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Ranking. Retrieved from <https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/>

⁶ World GDP per capita Ranking 2021. Retrieved from <https://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-capita-ranking.php>

Keberhasilan ini tidak terjadi secara kebetulan. Para pemimpin Singapura percaya bahwa setiap aspek masyarakat berkontribusi pada pertahanan kolektif dan kelangsungan hidup negara, maka Kerangka Pertahanan Total pun dikembangkan. Strategi Pertahanan Total Singapura adalah konsep pertahanan dan kelangsungan hidup nasional seluruh masyarakat yang diperkenalkan pada tahun 1984 sebagai pendekatan holistik untuk mendidik, memelihara, dan memperkuat Ketahanan Nasional Singapura.⁷ Hal ini didasarkan pada 5 pilar inti Pertahanan Militer, Sipil, Ekonomi, Sosial dan Psikologis, ditambah dengan pilar keenam, Digital, yang secara resmi diperkenalkan pada tahun 2019. Dari transformasi digital, pergeseran digital di Singapura juga meningkat seiring transformasi digital yang terjadi secara global (Lihat Gambar C-2 di Lampiran C). 92% warga Singapura (5,45 juta) menggunakan Internet, media sosial, dan aplikasi seluler setiap hari. Rata-rata waktu yang dihabiskan di internet adalah antara 4 hingga 7 jam di berbagai perangkat digital. Misalnya, platform media sosial favorit yang digunakan oleh warga Singapura adalah *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, *TikTok*, *Telegram*, dan *WeChat* (Lihat Gambar C-3 di Lampiran C). Memang, domain informasi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, sekolah, bisnis, dan pemerintah.

Namun, ini juga membuat masyarakat lebih rentan terhadap berita palsu dan disinformasi yang menyerang ekosistem informasi dan keamanan digital. Ketika transformasi digital menjadi penting bagi pembangunan nasional, ancaman dan dampak disinformasi juga meningkat akibat: (1) internet dan media, yang mempublikasikan konten dengan biaya lebih rendah, jangkauan lebih luas, dan sirkulasi lebih cepat; (2) media sosial, yang memungkinkan lebih banyak orang dan kelompok dengan berbagai tujuan untuk berinteraksi bahkan saat mereka mengonsumsi, memproduksi, dan mengedarkan ulang konten; dan (3) agen *Artificial Intelligence* (AI) yang mengotomatiskan pekerjaan aktor bermusuhan (Hacıyakupoglu et al., 2018; Quirós, 2021).

⁷ "[Driving home message of Total Defence](https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/biztimes19840403-1.2.11.11)". *Business Times*. 3 April 1984. Retrieved from <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/biztimes19840403-1.2.11.11>

Penyebaran dengan niat jahat maupun tidak, berita palsu dan disinformasi ini akan mengarah pada (1) terkikisnya kepercayaan pada lembaga-lembaga mapan dan sumber-sumber resmi, (2) meningkatnya polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat, dan (3) potensi bahaya terhadap individu (Vasu et al., 2018). Kami juga telah mengamati tren peningkatan disinformasi. Misalnya, selama pandemi Covid-19, berita palsu tentang efektivitas vaksin disebar, dan juga selama konflik Rusia-Ukraina baru-baru ini, berita palsu tentang serangan tertentu oleh masing-masing pihak disebar menggunakan rekaman perang lama dan tidak terkait. Oleh karena itu, penting untuk dapat melawan ancaman tersebut dengan memperkuat kemampuan seseorang.

Karena ancaman berita palsu dan disinformasi pada dasarnya merupakan risiko daring, hal ini menjadi tantangan bagi tata kelola dan ekosistem keamanan digital. Singapura telah menerapkan beberapa langkah untuk melawan disinformasi, seperti melalui undang-undang pada tahun 2021, namun, usaha-usaha itu mungkin tidak efektif atau holistik terhadap penyebaran berita palsu dan disinformasi. Tidak diragukan lagi, disinformasi merupakan ancaman di tingkat individu, komunitas, nasional dan global, yang tidak dapat diabaikan. Untuk sepenuhnya melindungi infrastruktur digital, menjaga keamanan informasi, dan menjamin lingkungan daring yang aman dan terpercaya bagi warga negara, kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan informasi menjadi bagian dari upaya keamanan digital untuk memperkuat Ketahanan Nasional Singapura. Sehingga, menjadi penting bagi Singapura untuk mempersiapkan diri dan masyarakatnya terhadap disinformasi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas dan dalam perjalanan transformasi digital Singapura, Singapura juga tidak kebal terhadap ancaman disinformasi. Singapura adalah negara yang heterogen, multi-rasial dan multi-budaya. Kejadian kecil yang berasal dari disinformasi dapat menyalakan api yang dapat memengaruhi kepercayaan terhadap lembaga publik dan menghancurkan tatanan masyarakatnya. Oleh karena itu, Parlemen Singapura membentuk *Select Committee on Deliberate Online Falsehoods* pada tahun 2018 untuk mengatasi

masalah kompleks ini (Chua, 2021). Memerangi disinformasi membutuhkan penguatan kemampuan informasi, seperti kerangka Pertahanan Total Singapura, dan pendekatan seluruh masyarakat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan multi-cabang untuk memerangi disinformasi harus diadopsi, yang berfokus pada: (1) memelihara publik yang terinformasi; (2) memperkuat kohesi sosial dan kepercayaan; (3) mempromosikan pengecekan fakta dan ekosistem pengecekan fakta yang kuat; (4) peran media, perusahaan teknologi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); (5) peran pemerintah Singapura untuk melakukan intervensi melalui undang-undang dan peraturan; dan (6) menghadapi ancaman keamanan dan kedaulatan nasional (Chua, 2021). Namun, apakah ini cukup untuk melawan disinformasi?

Berdasarkan analisis 6 pilar **Kerangka Pertahanan Total Singapura**, (1) **Aspek Sosial**: berita palsu, disinformasi, dan kampanye informasi bermusuhan (*Hostile Information Campaigns: HICs*) dapat secara langsung mempengaruhi persatuan ras, etnis, dan agama di Singapura. Hal ini dapat menyebabkan perpecahan dan ketidakpercayaan dalam masyarakat, menurunnya kepercayaan pada institusi publik, dan mengancam tatanan sosial di Singapura. (2) **Aspek Ekonomi**: disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pada lembaga publik dan investasi asing ke Singapura dan mempengaruhi stabilitas ekonomi Singapura. (3) **Aspek Psikologis**: ancaman dari disinformasi dapat melemahkan kemampuan masyarakat internal untuk bangkit bersama dan juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Singapura untuk melindungi dirinya sendiri. (4) **Aspek Militer**: Ketidakmampuan untuk mengelola dan bertahan melawan “musuh tak terlihat” dari serangan informasi dapat melumpuhkan kredibilitas dan kemampuan Angkatan Bersenjata Singapura. (5) **Aspek Sipil**: disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan dapat menyebabkan gangguan dan membanjiri infrastruktur penting dan menyebabkan keadaan darurat sipil. (6) **Aspek Digital**: domain digital adalah ruang pertempuran utama di mana disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan dapat berkembang, dan setiap kerentanan dalam domain digital menimbulkan ancaman bagi ketahanan nasional Singapura terhadap disinformasi. Dan pada

akhirnya, disinformasi merusak Konsep Pertahanan Total dan upaya Singapura untuk tetap berdaulat, bertahan, dan mempertahankan masa depan.

Oleh karena itu, masalah utama adalah Kemampuan Informasi masih belum optimal saat ini sehingga ancaman disinformasi dapat berdampak pada pertahanan sosial, sipil, psikologis, ekonomi, militer dan digital yang pada akhirnya mempengaruhi Ketahanan Nasional Singapura. Mengacu pada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas pokok permasalahan yang akan dibahas pada taskap ini adalah **“Bagaimana meningkatkan kemampuan informasi guna mencegah disinformasi dalam rangka memperkuat ketahanan nasional Singapura?”**

Adapun jabaran dari pokok permasalahan tersebut berkaitan dengan pertanyaan kajian dan pokok-pokok persoalan sebagai berikut:

- a. Bagaimana optimalisasi peraturan perundang-undangan dan perangkat hukum yang ada demi mendukung penguatan dan pengembangan kemampuan informasi?
- b. Bagaimana optimalisasi Instansi Operasional Utama yang telah dibentuk untuk berkontribusi pada pengembangan kemampuan informasi yang optimal?
- c. Bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Informasi?
- d. Bagaimana optimalisasi kerja sama antar para pemangku kepentingan dalam penggunaan dan keamanan informasi?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran strategis, dan analisis tentang ancaman disinformasi dan kampanye informasi

bermusuhan, serta rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan informasi untuk memperkuat Ketahanan Nasional Singapura.

b. Tujuan

Tujuan dari Taskap ini adalah untuk memberikan saran dan masukan yang strategis, dan rekomendasi kepada para pengambil keputusan nasional dan pembuat kebijakan dengan mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan dengan kemampuan informasi yang berkaitan dengan pertahanan sosial, ekonomi, psikologis, militer, sipil dan digital Singapura untuk memperkuat Ketahanan Nasional Singapura.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian akan difokuskan pada kemampuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan dan memanfaatkan berbagai kemampuan informasi dengan benar untuk memastikan keberhasilan Singapura untuk mempertahankan Pertahanan Nasional Singapura.⁸ Ruang lingkup ini (1) Tidak termasuk analisis dampak pada Pilar Konsep Pertahanan Total lainnya (Pertahanan Militer). Ini juga (2) terbatas pada konteks Singapura dan tidak akan menganalisis konteks negara-negara lain di kawasan dan dunia, tetapi negara-negara lain akan digunakan sebagai contoh. Terakhir, (3) informasi rahasia tentang rencana dan kapabilitas pengembangan nasional untuk melawan disinformasi tidak akan dicakup dalam taskap ini. Penelitian ini hanya terbatas pada bahan sumber yang terbuka untuk publik.

b. Sistematika

- 1) **Bab I: Pendahuluan.** Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup

⁸ Chua, R. (2021). Looking Beyond POFMA to Combat Fake News and Misinformation in Singapore. *Singapore Policy Journal*. URL: <https://spj.hkspublications.org/2021/10/24/looking-beyond-pofma-to-combat-fake-news-and-misinformation-in-singapore/>

penelitian dan sistematika dengan teori-teori yang digunakan. metode dan pendekatan yang digunakan; dan definisi istilah kunci yang digunakan dalam taskap ini.

2) **Bab II: Landasan Pemikiran.** Bab ini pertama-tama menjelaskan tentang Paradigma Nasional Singapura sebagai Ideologi fundamental, Konstitusi Singapura sebagai landasan konstitusional, konsep Kelangsungan Hidup, Keamanan, Kesuksesan (**S-3: Survival-Security-Success**) sebagai visi nasional dan Kerangka Pertahanan Total Singapura (**Total Defence Framework**) sebagai landasan konseptual. Bab ini juga akan memeriksa peraturan dan perundang-undangan terkait dengan disinformasi dan Kampanye Informasi Bermusuhan, dan juga memeriksa inisiatif non-hukum yang diambil untuk melawan disinformasi dan menjaga kohesi sosial. Beberapa teori dasar inti dan tinjauan pustaka juga akan diartikulasikan dalam bab ini untuk memberikan kerangka teoretis dan dasar logis di mana ancaman disinformasi dan Kampanye Informasi Bermusuhan akan dianalisis dan bagaimana kemampuan informasi dapat diperkuat untuk mencapai keamanan dan ketahanan Singapura.

3) **Bab III: Pembahasan.** Bab ini akan menguraikan kemampuan informasi Singapura saat ini dalam kerangka peraturan, kebijakan, dan perundang-undangan; Badan-badan operasional yang terkait dengan informasi; Kesadaran dan pendidikan publik, serta SDM informasi dan; kerja sama antara Singapura dan mitra regional dan internasional yang berpikiran sama di bidang pengembangan informasi. Menggunakan kerangka teoritis dari proses tiga tahap: (1) *Sense-Making* Strategis, (2) Manajemen Risiko dan (3) Pembangunan Ketahanan, taskap ini akan membahas setiap subjek dalam konteks kemampuan informasi dan Ketahanan Nasional Singapura. Kemudian, Bab ini akan mengusulkan strategi jangka panjang, nama "Merasakan, Menghalangi, Berkolaborasi" (**Sense, Deter, Collaborate**) untuk mengembangkan kemampuan informasi

Singapura yang akan terdiri dari rencana untuk Tata Kelola Informasi Responsif dan Dinamis (***Responsive and Dynamic Info Governance***) untuk disinformasi, Kemitraan 5 Sisi antara pemerintah, masyarakat, institusi swasta, perusahaan media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (***Penta-Helix Info-Partnership***), ekosistem Keahlian Informasi (***Info-expertise Ecosystem***) dan Tenaga Kerja Informasi (***Info Practitioners and Workforce***), Kesadaran dan Kesiapan Informasi (***Info Awareness and Readiness***), dan Diplomasi Informasi (***Info Diplomacy***) sebagai bagian dari memperkuat Ketahanan Nasional Singapura terhadap disinformasi.

4) **Bab IV: Penutup.** Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam rangka meningkatkan kemampuan informasi untuk memperkuat Ketahanan Nasional Singapura terhadap disinformasi.

5. **Metode dan Pendekatan**

Taskap ini menggunakan metode penulisan kualitatif-deskriptif dengan studi literatur, data-data dari berbagai sumber dan badan perkuliahan selama mengikuti pendidikan di Lemhannas. Pendekatan Taskap ini dilakukan secara komprehensif, holistik dan integral, dengan menggunakan perspektif Pertahanan Nasional, Ketahanan Nasional dan Pembangunan Nasional.

6. **Pengertian**

a. **Disinformasi.** Disinformasi dapat didefinisikan sebagai informasi yang palsu atau menyesatkan yang sengaja dibuat, disajikan, dan disebarluaskan untuk keuntungan ekonomi atau dengan sengaja menipu atau memanipulasi hadirin sasaran.⁹

⁹ Quirós, C. T. (2021). Strategic communications as a key factor in countering hybrid threats. *European Parliamentary Research Service, Scientific Foresight Unit (STOA)*. Retrieved from [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656323/EPRS_STU\(2021\)656323_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656323/EPRS_STU(2021)656323_EN.pdf)

b. **Kampanye Informasi Bermusuhan.** Kampanye Informasi Bermusuhan dalam konteks saat ini dapat dipahami sebagai upaya terselubung dan terkoordinasi oleh aktor asing untuk menembus berbagai segmen dan lapisan masyarakat, dengan maksud menciptakan dan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk memanipulasi sentimen publik dan merugikan kepentingan Singapura. Ini termasuk kebenaran, setengah kebenaran, sindiran dan berbagai bentuk informasi lainnya.¹⁰ Kampanye Informasi Bermusuhan bertujuan untuk mengeksploitasi kesenjangan sosial, melemahkan kepercayaan pada lembaga publik dan di antara masyarakat, dan menabur perselisihan.

c. **Ancaman Disinformasi.** Ancaman Disinformasi mengacu pada (1) informasi yang salah dan berita palsu, (2) memanipulasi publik, (3) mengeksploitasi kesenjangan sosial, dan (4) menciptakan kesenjangan sosial.

d. **Kemampuan Informasi.** Dalam lingkup taskap ini, kemampuan informasi mengacu pada memiliki (1) struktur organisasi di dalam pemerintah Singapura dan entitas swasta yang dirancang dan disusun untuk menghadapi ancaman disinformasi, (2) kebijakan dan perundang-undang terhadap ancaman disinformasi, dan (3) kemampuan khusus menghadapi disinformasi, termasuk literasi media, kesadaran tentang disinformasi, dan penggunaan media arus utama dan perusahaan media sosial.

e. **Ketahanan Nasional Singapura.** Ketahanan Nasional Singapura yang didasarkan pada konsep '*Total Defence*' (TD) atau Pertahanan Total yang dipimpin oleh Kementerian Pertahanan Singapura (*MINDEF*) dan Angkatan Bersenjata Singapura (*Singapore Armed Forces: SAF*). Diperkenalkan pada tahun 1984, konsep ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memastikan keamanan nasional, kedaulatan dan kelangsungan hidup Singapura; mencapai kesuksesan berkelanjutan

¹⁰ Cheong, D. D., Neubronner, S., & Ramakrishna, K. (2020). Foreign Interference in Domestic Politics: A National Security Perspective. *S. Rajaratnam School of International Studies*. Retrieved from https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2020/04/PR200409_Foreign-Interference-in-Domestic-Politics.pdf

Singapura, dan menanggapi semua ancaman dan tantangan. Ini melibatkan setiap warga negara Singapura. Konsep ini berhasil memungkinkan Singapura untuk mengalami dan mengatasi krisis nasional secara kolektif. Konsep ini terdiri dari enam pilar pertahanan dalam masyarakat, yaitu Sosial, Ekonomi, Psikologis, Militer, Sipil, dan Digital. Pilar Digital ini yang baru ditambahkan pada Februari 2019 (Lihat Gambar C-4 di Lampiran C).



BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Paradigma Nasional Singapura didasarkan pada arsitektur keamanan yang kuat yang mencakup aspek Sipil, Sosial, Ekonomi, Psikologis, dan Militer. Aspek Digital ditambahkan pada Februari 2019, sebagai pengakuan atas ancaman digital yang dibawa oleh transformasi digital. Ini dipadukan dengan nilai-nilai dan keyakinan demokrasi, serta harmoni sosial untuk mencapai kemajuan dan kesuksesan ekonomi. Ini akan menyediakan lingkungan untuk kelangsungan hidup berkelanjutan Singapura sebagai negara berdaulat. Bahaya yang berkembang dari disinformasi, berita palsu dan kampanye informasi bermusuhan akan berdampak pasti pada kelangsungan hidup Singapura dan ideologinya, jika ancaman ini tidak dikelola.

Untuk memastikan dan mencapai visi Singapura tentang Kelangsungan Hidup, Keamanan, Kesuksesan (*S-3: Survival, Security and Success*), Singapura harus membangun dan memperkuat kemampuan informasi. Paradigma Nasional harus menjadi landasan pemikiran dalam memperkuat kemampuan informasi terhadap disinformasi, yang termasuk (1) Landasan Konstitusional berupa Konstitusi Republik Singapura, (2) Landasan Visi berupa Kelangsungan Hidup, Keamanan, Kesuksesan (*S-3*), (3) Landasan Konseptual berupa Pertahanan Total Singapura (*Total Defence: TD*), dan (4) peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Dalam bab ini, taskap ini juga akan memeriksa peraturan perundang-undangan terkait terhadap disinformasi dan berita palsu. Beberapa landasan teoritis inti dan tinjauan literatur juga akan diartikulasikan untuk memberikan kerangka teoritis dan dasar logis di mana ancaman disinformasi akan dianalisis dan bagaimana meningkatkan kemampuan informasi untuk memperkuat Ketahanan Nasional Singapura terhadap disinformasi.

8. Paradigma Nasional

a. **Konstitusi Republik Singapura sebagai Landasan Konstitusional**

Konstitusi Singapura didasarkan pada "Undang-undang Kemerdekaan Republik Singapura 1965". Di tingkat nasional, Konstitusi Singapura memiliki tempat tertinggi dalam hukum.¹¹ Telah diamandemen pada tahun 1966, dan bertujuan untuk mengkonkretkan hal-hal berikut: (1) Perlindungan kehidupan dan kebebasan; (2) Larangan perbudakan dan kerja paksa; (3) Perlindungan hukum pidana berlaku surut dan persidangan berulang; (4) Kesetaraan dan perlindungan hukum yang setara; (5) Larangan pembuangan dan kebebasan bergerak; (6) Kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat; (7) Kebebasan beragama; dan (8) Hak pendidikan.

Selain itu, harmoni rasial di antara berbagai agama dan ras di Singapura terus menjadi prinsip utama Konstitusi Singapura. Dengan ancaman disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan, kami melanjutkan kebutuhan untuk menjunjung tinggi Konstitusi Singapura dalam melindungi semua kepentingan ini untuk masyarakat.

b. **Kelangsungan Hidup, Kesuksesan dan Keamanan (S3 - *Survival, Security, Success*) sebagai Landasan Visional**

Tiga pilar inti Kelangsungan Hidup, Keamanan dan Kesuksesan membentuk visi untuk kelanjutan status Singapura sebagai negara berdaulat. Pembangunan nasional didasarkan pada keamanan dan stabilitas. Dengan tercapainya keamanan, pembangunan nasional secara bertahap ditimbang terhadap keberhasilan ekonomi dalam masyarakat.

Meskipun setiap generasi orang Singapura dihadapkan pada tantangan dan peluang unik berdasarkan lingkungan internal dan eksternal pada masanya, visi inti ini tetap konstan. Visi ini mendefinisikan budaya, 'cara hidup', dan identitas nasional Singapura, yang didasarkan pada 5 nilai bersama Singapura (1) Bangsa di atas komunitas dan masyarakat di atas diri

¹¹ Constitution of the Republic of Singapore. (1965). URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/CONS1963>.

sendiri, (2) Keluarga sebagai unit dasar masyarakat, (3) Dukungan masyarakat dan rasa hormat terhadap individu, (4) Konsensus, bukan konflik, dan (5) Harmoni ras dan agama.¹² Dengan transformasi digital, ancaman disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan berpotensi mengikis nilai-nilai nasional ini dan mengancam Identitas, Ideologi, Nilai Bersama, dan Cara Hidup Singapura.

c. **Pertahanan Total (*Total Defence*) sebagai Landasan Konsepsional**

Di Singapura, setiap aspek masyarakat berkontribusi pada pertahanan kolektif dan kelangsungan hidup negara, maka Kerangka Pertahanan Total dikembangkan. Strategi Pertahanan Total Singapura adalah konsep pertahanan dan kelangsungan hidup nasional seluruh masyarakat yang diperkenalkan pada tahun 1984 sebagai pendekatan holistik untuk mendidik, memelihara, dan memperkuat Ketahanan Nasional Singapura.¹³ Ini didasarkan pada 5 pilar inti Pertahanan Militer, Sipil, Ekonomi, Sosial dan Psikologis, dengan pilar keenam, Digital, secara resmi diperkenalkan pada tahun 2019. Ini menandakan semakin pentingnya melindungi bangsa terhadap ancaman disinformasi di dunia digital saat ini. Oleh karena itu, ancaman disinformasi benar-benar menjangkau semua pilar Pertahanan Total.

9. **Peraturan Perundang-Undangan dan Kelembagaan**

a. **Kesetaraan Sosial**

Berdasarkan Pasal 12 Konstitusi Republik Singapura¹⁴, secara jelas dinyatakan bahwa semua orang dijamin setara di hadapan hukum. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa tidak ada warga negara yang akan dikenai segala bentuk diskriminasi berdasarkan agama, ras, keturunan dan tempat

¹² National Library Board. (2022). Shared Values are Adopted. *HistorySG*. URL: [https://eresources.nlb.gov.sg/history/events/62f98f76-d54d-415d-93a1-4561c776ab97#:~:text=The%20five%20Shared%20Values%20that,5\)%20Racial%20and%20religious%20harmony.](https://eresources.nlb.gov.sg/history/events/62f98f76-d54d-415d-93a1-4561c776ab97#:~:text=The%20five%20Shared%20Values%20that,5)%20Racial%20and%20religious%20harmony.)

¹³ "[Driving home message of Total Defence](#)". *Business Times*. 3 April 1984. URL: <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/biztimes19840403-1.2.11.11>

¹⁴ Constitution of the Republic of Singapore, Part 4, Article 12. (1965). URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/CONS1963?ProvIds=P14-#pr12->

lahir. Konstitusi juga akan berlaku untuk segala bentuk diskriminasi, melalui ucapan dan tindakan, dalam bentuk media tradisional dan sosial apa pun. Karena disinformasi menargetkan kohesi sosial dan menciptakan kesenjangan sosial, ini merupakan ancaman langsung terhadap Konstitusi Republik Singapura. Konstitusi Republik Singapura, Pasal 12, Bagian 1 dan 2:

Pasal 12 (1): Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama.

Pasal 12 (2): Kecuali secara tegas diizinkan oleh Konstitusi ini, tidak akan ada diskriminasi terhadap warga negara Singapura hanya berdasarkan agama, ras, keturunan atau tempat lahir dalam undang-undang apa pun atau dalam penunjukan suatu jabatan atau pekerjaan di bawah otoritas publik atau dalam administrasi hukum apa pun yang berkaitan dengan perolehan, kepemilikan, atau pelepasan properti atau penetapan atau pelaksanaan perdagangan, bisnis, profesi, panggilan atau pekerjaan apa pun.

b. Undang-undang Keamanan Siber

Menyadari meningkatnya ancaman disinformasi yang berasal dari dunia maya, Undang-undang Keamanan Siber diperkenalkan pada 5 Februari 2018.¹⁵ Ini menetapkan kerangka peraturan bagi pemilik infrastruktur informasi publik dan swasta yang penting untuk memantau dan melaporkan semua ancaman keamanan siber. Undang-undang ini memberi wewenang kepada Komisaris Keamanan Siber untuk menyelidiki ancaman dan insiden keamanan siber untuk menentukan dampaknya dan mencegah timbulnya bahaya atau insiden keamanan siber lebih lanjut. Kekuasaan yang dapat digunakan dikalibrasi sesuai dengan tingkat keparahan ancaman atau insiden keamanan siber dan tindakan yang diperlukan untuk merespons. Ini memastikan bahwa Pemerintah Singapura dapat merespons secara efektif ancaman keamanan siber dan menjaga keamanan Singapura dan warga

¹⁵ Singapore Statutes Online. "Cybersecurity Act 2018", 7 Aug 22. URL: https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/9-2018/Published/20211231?DocDate=20180312&ViewType=Pdf&_=20220422184321

Singapura.¹⁶ Ini sangat penting karena berita palsu dan disinformasi biasanya berkembang biak melalui dunia maya, dan undang-undang semacam itu diperlukan untuk menegakkannya.

c. **Penyalahgunaan Informasi**

Undang-undang Otoritas Pengembangan Info-Komunikasi Singapura Tahun 2016¹⁷ (RUU nomor 22 tahun 2016) dan Undang-undang Telekomunikasi (Bab 323)¹⁸ saat ini mengatur penggunaan info-komunikasi di Singapura. Kedua undang-undang tersebut mencakup berbagai aspek perkembangan Info-Komunikasi di Singapura. Di bawah Undang-undang Telekomunikasi, mengirimkan pesan yang sengaja palsu merupakan pelanggaran. Namun, undang-undang saat ini lebih fokus pada promosi Teknologi Info-Komunikasi di Singapura, sedangkan penyalahgunaan media dan informasi masih diatur oleh bagian lain dari Konstitusi termasuk Pasal 12, yang mengatur kesetaraan dan ketertiban sosial. Menyadari celah ini, Pemerintah Singapura telah mengidentifikasi 2 undang-undang baru untuk mengatasi masalah berita palsu dan disinformasi, dan ini dibahas dalam 2 paragraf di bawah ini.

d. **Undang-undang Perlindungan Dari Kepalsuan Daring dan Manipulasi Tahun 2019 [Protection From Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA) 2019]**

Undang undang ini¹⁹ disahkan pada bulan Mei 2019 (RUU nomor 10 tahun 2019). Undang-undang ini bertujuan untuk memerangi penyebaran dan pengaruh berita palsu dan disinformasi yang dapat menyebabkan kerugian serius melalui pengikisan kepercayaan pada lembaga publik dan pemilu, menghasut kekacauan publik, dan campur tangan dalam kebijakan nasional. Ini mengriminalisasi penyebaran kebohongan daring yang

¹⁶ Cyber Security Agency of Singapore (CSA). Cybersecurity Act. URL: <https://www.csa.gov.sg/legislation/cybersecurity-act>

¹⁷ Singapore Statutes Online. "Info-communications Media Development Authority Act 2016", 7 Aug 22. URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/IMDAA2016>

¹⁸ Singapore Statutes Online. "Telecommunications Act 1999", 7 Aug 22. URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/TA1999>

¹⁹ Singapore Statutes Online. "Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act 2019", 7 Aug 2022. URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/POFMA2019>

disengaja pada komunikasi daring, media sosial, dan platform perpesanan pribadi.²⁰ Ini memberi pemerintah dan sistem hukum otoritas yang relevan untuk melindungi, memblokir, atau mencegah penyebaran berita palsu dan disinformasi daring. Undang-undang ini mencakup akun daring dan bot yang digunakan oleh aktor dengan niat jahat untuk merugikan kepentingan publik. Ini mengartikulasikan Kode Praktik yang mengikat bagi perusahaan teknologi untuk menjaga platform daring tetap aman dengan fokus pada akun palsu dan transparansi.

e. **Undang-undang Interferensi Asing (Penanggulangan) Tahun 2021 [*Foreign Interference (Countermeasures) Act (FICA) 2021*]**

Undang undang ini²¹ disahkan pada bulan October 2021 (RUU nomor 28 tahun 2021). Undang-undang ini tersebut memberikan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, dan mengganggu campur tangan asing dalam politik domestik kita yang dilakukan melalui (1) kampanye informasi bermusuhan, dan (2) penggunaan proxy lokal. Berdasarkan undang-undang ini, Menteri Dalam Negeri (*Minister for Home Affairs*) akan memiliki wewenang untuk memberikan arahan kepada berbagai entitas seperti layanan media sosial, layanan elektronik terkait, layanan akses internet, dan orang yang memiliki atau menjalankan situs web, blog, atau halaman media sosial, untuk membantu pihak berwenang menyelidiki dan melawan kampanye informasi bermusuhan yang berasal dari luar negeri. Undang-undang ini juga mencakup pelanggaran yang terkait dengan campur tangan asing secara rahasia melalui aktivitas komunikasi elektronik, yang berurusan dengan orang-orang yang secara rahasia dan dengan sengaja bertindak melawan kepentingan umum atas nama aktor asing.²² Sebagai masyarakat

²⁰ Chua, R. (2021). Looking Beyond POFMA to Combat Fake News and Misinformation in Singapore. *Singapore Policy Journal*. Retrieved from <https://spj.hkspublications.org/2021/10/24/looking-beyond-pofma-to-combat-fake-news-and-misinformation-in-singapore/>

²¹ Singapore Statutes Online. "Foreign Interference (Countermeasures) Act (FICA) 2021", 7 Aug 2022. URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/FICA2021>

²² Ministry of Home Affairs. "HIC Provisions of the Foreign Interference (Countermeasures) Act to Take Effect from 7 July 2022", 6 Jul 2022. URL: <https://www.mha.gov.sg/mediaroom/press-releases/hic-provisions-of-the-foreign-interference-countermeasures-act-to-take-effect-from-7-july-2022/>

yang terbuka, sangat terhubung secara digital, dan beragam, Singapura sangat rentan terhadap campur tangan asing.

Misalnya, selama periode ketegangan dengan negara lain antara 2016 dan 2017, Singapura mengalami kampanye informasi bermusuhan terkoordinasi yang berusaha melemahkan posisi kebijakan luar negeri kami. Komentar dan video daring diunggah oleh akun media sosial yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun. Konten ini juga diedarkan secara luas melalui aplikasi obrolan dan ditujukan untuk memengaruhi sentimen di antara warga Singapura.²³

10. **Data dan Fakta**

Secara global, survei *Edelman Trust Barometer 2022* menyatakan bahwa ada (1) penurunan kepercayaan pada pemerintah di 17 dari 27 negara, dan (2) penurunan kepercayaan pada media di 15 dari 27 negara.²⁴ Demikian pula, survei 2018 oleh lembaga riset pasar independen global, *Ipsos*, mengungkapkan bahwa warga Singapura masih rentan terhadap berita palsu dan disinformasi. 79% orang Singapura 'agak' atau 'sangat percaya diri' dalam kemampuan mereka untuk mendeteksi 'berita palsu', dan ini lebih tinggi di antara pria, dan mereka yang memiliki gelar sarjana. 91% salah mengidentifikasi satu atau lebih berita utama 'berita palsu' sebagai berita utama saat disajikan dengan 5 berita utama 'berita palsu' dan ditanya apakah berita tersebut nyata atau tidak. 45% telah salah percaya sebuah berita itu nyata sampai mereka menemukan sebaliknya. Tingkat kerentanan lebih tinggi di antara mereka yang berusia 15-24 tahun sebesar 55%. Warga Singapura memperoleh berita mereka dari berbagai media. Situs daring (termasuk media sosial) adalah sumber informasi utama bagi banyak orang Singapura; Facebook adalah yang paling sering diakses (60%), diikuti oleh media sosial

²³ Ibid. Ministry of Home Affairs. "HIC Provisions of the Foreign Interference (Countermeasures) Act to Take Effect from 7 July 2022", 6 Jul 2022. Retrieved from <https://www.mha.gov.sg/mediaroom/press-releases/hic-provisions-of-the-foreign-interference-countermeasures-act-to-take-effect-from-7-july-2022/>

²⁴ Edelman. (2022). 2022 Edelman Trust Barometer. URL: <https://www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer>

umumnya (53%) dan situs web surat kabar (52%) (Lihat Gambar C-5 di Lampiran C).²⁵

Di bidang legislatif per Desember 2021, Undang-undang Perlindungan Dari Kepalsuan Daring dan Manipulasi Tahun 2019 (*POFMA*) telah digunakan 33 kali sejak mulai berlaku pada 2019, dengan lebih dari setengahnya, 19 kasus, untuk mengoreksi disinformasi selama pandemi Covid-19.²⁶ Selain Singapura, negara lain juga melihat undang-undang sebagai pendekatan terbaik untuk melawan berita palsu (Lihat Tabel B-1 di Lampiran B).²⁷

Data ini menunjukkan bahwa ancaman disinformasi sangat nyata, dan Singapura dan warga Singapura sangat rentan terhadap ancaman disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan.

11. Kerangka Teoritis

Dalam upaya transformasi digital global, Sarts (2021) mengatakan bahwa lingkungan informasi kontemporer telah menciptakan ruang yang menguntungkan bagi penyebaran kampanye disinformasi bermusuhan. Hal ini ditandai dengan konsumsi informasi yang terus-menerus yang dimungkinkan oleh perangkat seluler pintar yang menghasilkan siklus berita individual yang berkelanjutan, demokratisasi penyedia informasi, dan munculnya ruang gema informasi yang didorong oleh algoritme. Tempo arus informasi yang tinggi ini juga mendorong konsumen untuk mengurangi jumlah waktu yang mereka habiskan untuk berita tertentu menjadi hanya beberapa detik.²⁸ Lingkungan informasi ini adalah lahan subur untuk melakukan kampanye disinformasi dan disinformasi yang tidak bersahabat.

²⁵ Ipsos. (2018). The Susceptibility of Singaporeans Towards Fake News, 28 Sep 2018. URL: <https://www.ipsos.com/en-sg/susceptibility-singaporeans-towards-fake-news>

²⁶ The Straits Times. (2021). "Singapore's fake news law used 33 times to date, including 19 against Covid-19 misinformation", 1 Dec 2021. URL: <https://www.straitstimes.com/tech/tech-news/singapores-fake-news-law-used-33-times-to-date-including-19-times-against-covid-19>

²⁷ Hacıyakupoglu, G., Hui, J. Y., Suguna, V. S., Leong, D., & Rahman, M. F. B. A. (2018). *Countering Fake News: A Survey of Recent Global Initiatives*. S. Rajaratnam School of International Studies. URL: https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/03/PR180416_Countering-Fake-News.pdf

²⁸ Consumer Insights. (2015). *Attention Spans*. URL: <https://dl.motamem.org/microsoft-attention-spans-research-report.pdf>

Haciyakupoglu et al. (2018) menambahkan bahwa berita palsu, meskipun bukan fenomena baru, telah mengumpulkan perhatian global selama pemilihan presiden US pada tahun 2016. Berita palsu di era digital mencakup spektrum kategori, dengan motivasi yang bervariasi tetapi terkadang tumpang tindih: politik, subversif, keuangan, dan hiburan.²⁹ Dampak berita palsu diperkuat melalui: (1) platform internet, yang mempublikasikan konten dengan biaya yang jauh lebih rendah, jangkauan yang lebih luas, dan sirkulasi yang lebih cepat; (2) media sosial, yang memungkinkan lebih banyak orang dan kelompok dari berbagai persuasi untuk berinteraksi bahkan saat mereka mengonsumsi, memproduksi, dan mengedarkan ulang konten; dan (3) agen kecerdasan buatan (AI) yang mengotomatisasi pekerjaan penyebar manusia. Oleh karena itu, berita palsu dan disinformasi telah menjadi isu keamanan nasional.

Di Asia Tenggara, Tapsell (2021) mengatakan bahwa transformasi digital di Asia Tenggara telah mengakibatkan sejumlah besar orang Asia Tenggara memperoleh berita mereka dari media sosial, dan tidak memeriksa fakta berita yang mereka konsumsi, meningkatkan kemudahan penyebaran disinformasi. Tapsell (2021) juga menekankan bahwa banyak warga Asia Tenggara yang tidak mempercayai sumber berita resmi karena pengalaman manipulasi politik dan korupsi pers mereka, dan malah mencari sumber informasi alternatif dari sumber yang mereka anggap lebih 'terpercaya' di media sosial.

Menjadi sangat digital, Singapura juga tidak kebal terhadap berita palsu dan disinformasi. Jayakumar et al. (2021) mengakui bahwa undang-undang saja tidak cukup dalam melawan berita palsu dan memerangi disinformasi dan pemerintah Singapura telah berulang kali mengakui perlunya melihat lebih dari sekadar undang-undang untuk melawan kebohongan daring. Haciyakupoglu et al. (2018) juga mengidentifikasi bahwa tindakan non-legislatif juga dapat menanamkan literasi media dan pemikiran kritis. Demikian pula pada tahun 2019 setelah UU

²⁹ Steinberg, L. (2017). "Infographic: Beyond Fake News – 10 Types of Misleading News," *European Association for Viewers Interest (EAVI)*. URL: <https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info/>

Perlindungan Dari Kepalsuan Daring dan Manipulasi Tahun 2019 disahkan Menteri Komunikasi dan Informasi (MCI) Singapura S. Iswaran mengakui sebagai berikut:

“Perundang-undangan diperlukan tetapi tidak cukup dalam memerangi kebohongan daring... Garis pertahanan pertama dan terpenting [Singapura] melawan kebohongan daring adalah warga negara yang berpengetahuan luas dan cerdas, dilengkapi dengan alat untuk memerangi kebohongan daring”³⁰

Oleh karena itu, bagian ini menyediakan tinjauan pustaka dalam persiapan taskap dengan penekanan pada: (1) **Pembangunan Nasional, Pertahanan Nasional dan Ketahanan Nasional**, (2) **Kebijakan pemerintah Singapura, peraturan dan tata kelola terhadap disinformasi**, dan (3) **Ancaman Disinformasi dan Kampanye Informasi Bermusuhan terhadap masyarakat dan ketahanan nasional**. Analisis yang mengikuti akan diterapkan pada konteks Singapura, menggunakan kerangka teori literatur ini.

a. **Pembangunan, Pertahanan dan Ketahanan Nasional**

Untuk memahami pentingnya kebutuhan sosial bagi negara manapun, "*Hirarki Kebutuhan: Teori Motivasi Manusia*" (*Hierarchy of Needs: A Theory of Human Motivation*) oleh Maslow A.H. (1943) adalah sumber literatur yang penting.³¹ Maslow (1943) berteori tentang berbagai tingkat kebutuhan manusia. Teori ini penting untuk memahami pentingnya kebutuhan sosial, rasa hormat dan aktualisasi diri bagi warga Singapura, dan motivasi warga Singapura untuk menjunjung tinggi nilai-nilai nasional, menempa kesuksesan ekonomi, dan mempertahankan keamanan dan kelangsungan hidup dan kedaulatan Singapura.

³⁰ Channel NewsAsia. (2019). "Ministers Issuing Directives, with Scope for Judicial Oversight, Strikes Best Balance in Combating Fake News: Iswaran", *ChannelNewsAsia*, 8 May 2019. URL: <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/ministers-given-authority-issue-directives-fake-news-pofma-bill-11514544>.

³¹ A. H. Maslow. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.

“*Disinformasi dalam Demokrasi: Meningkatkan Ketahanan Sosial terhadap Disinformasi*”³² (*Disinformation in Democracies: Improving Societal Resilience to Disinformation*) oleh Hassain J. (2022) menjelaskan dampak media sosial dan disinformasi terhadap perilaku masyarakat. Bacaan tersebut menjelaskan kerentanan masyarakat terhadap disinformasi dan juga ketahanan masyarakat untuk mengatasi kerentanan tersebut. Pelajaran dan pengamatan Hassain (2022) dapat diterapkan pada masyarakat Singapura untuk memahami dampak informasi dan disinformasi terhadap perilaku masyarakat. Hal ini akan memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana memperkuat kemampuan informasi dalam rangka memperkuat ketahanan nasional terhadap disinformasi.

b. Kebijakan Pemerintah Singapura, Peraturan dan Tata Kelola Terhadap Disinformasi dan Ketahanan Nasional

Untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang dasar-dasar pemerintahan di Singapura, khususnya tentang institusi nasional, pertimbangan dan tantangan kebijakan, buku-buku berikut: "*Tata Kelola Dinamis – Menanamkan Budaya, Kemampuan, dan Perubahan di Singapura*" (*Dynamic Governance – Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*) oleh Neo B. S. (2007), and "*Pilihan Sulit – Menantang Konsensus Singapura*" (*Hard Choices – Challenging the Singapore Consensus*) oleh Vada Keth & Low (2014) relevan dengan topik ini. "Mengapa Bangsa Gagal" (*Why Nations Fail?*) oleh Acemoglu D. (2012) menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi, keamanan, dan sosial memiliki pengaruh langsung terhadap pembangunan nasional, budaya dan kelembagaan di suatu negara. Buku-buku ini memberikan kerangka kerja untuk menganalisis pembuatan kebijakan dan tata kelola terkait dengan disinformasi di Singapura.

³² Hassain, J. (2022). *Disinformation in Democracies: Improving Societal Resilience to Disinformation*. NATO StratCom Centre of Excellence. URL: <https://stratcomcoe.org/publications/disinformation-in-democracies-improving-societal-resilience-to-disinformation/241>

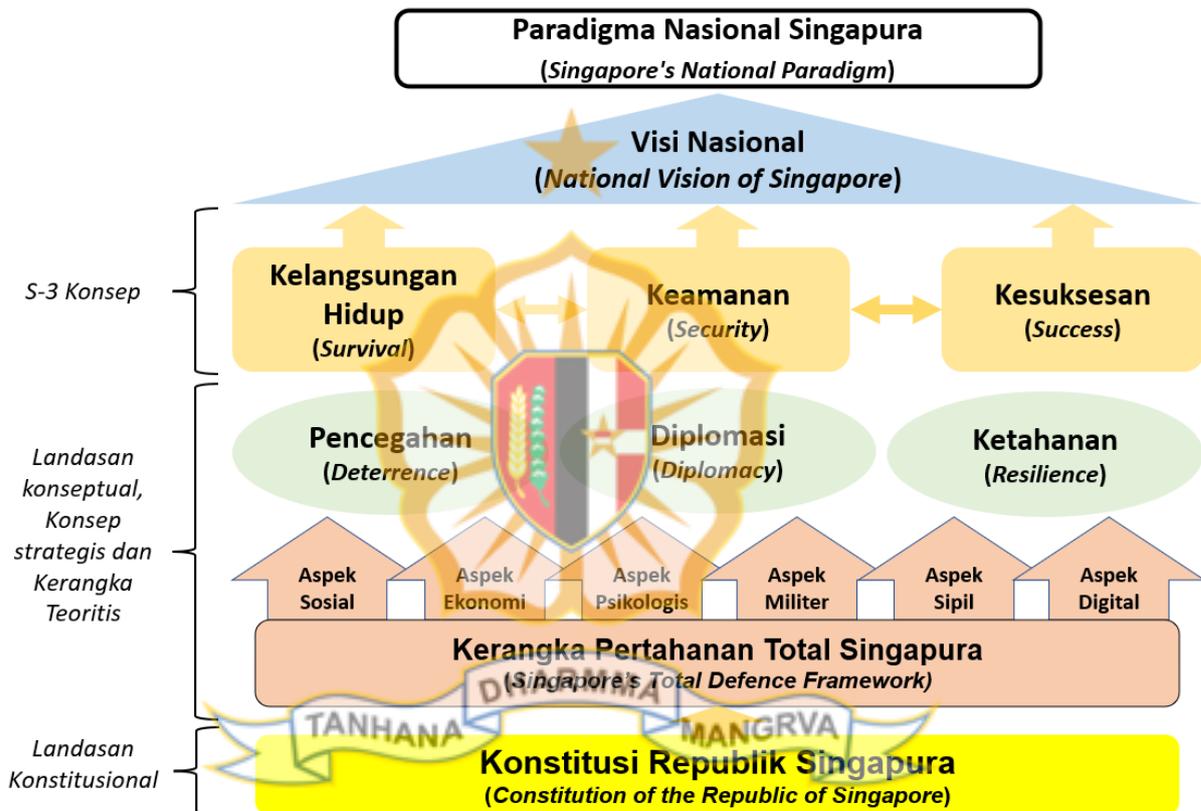
“Berita Palsu: Keamanan Nasional di Era Pasca Kebenaran” (Fake News: National Security in the Post-Truth Era) oleh Vasu et al. (2018) menjelaskan disinformasi telah merusak Keamanan Nasional dan kohesi sosial, dan bagaimana penggunaan berita palsu sebagai media untuk kampanye informasi bermusuhan dengan tujuan mengacaukan negara melalui subversi masyarakat, termasuk pemilihan umum. Juga, *“Mitigasi Disinformasi dalam Pemilu Asia Tenggara” (Mitigating Disinformation in Southeast Asian Elections)* yang diterbitkan oleh NATO StratCom COE meneliti aktivitas disinformasi di negara-negara Asia Tenggara dan memberikan pelajaran yang berguna dan relevan. Wawasan ini dapat diterapkan ke Singapura dalam konteks pengembangan kemampuan informasi holistik, keterlibatan aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pembangunan nasional.

c. **Ancaman Disinformasi, Kampanye Informasi Bermusuhan dan Masyarakat.**

“Berita Palsu dalam Konteks Nyata” (Fake News in Real Context) oleh Levinson P. (2017) memberikan konteks historis dan terkini mengenai masalah berita palsu. Ia menyoroti dampak berita palsu melalui contoh historis dan menganalisis bagaimana masalah ini akan berdampak pada dunia saat ini dan masa depan. *“Manipulasi Informasi: Tantangan bagi Demokrasi Kita” (Information Manipulation: A Challenge for Our Democracies)* oleh Vilmer et al. (2018) menyatakan bahwa ancaman disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan bukanlah fenomena baru, tetapi (1) kapasitas internet dan jaringan sosial yang belum pernah ada sebelumnya untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan viral; dan (2) terkikisnya kepercayaan dan keyakinan terhadap demokrasi kita, telah membuat semakin sulitnya memerangi disinformasi. Vilmer et al. (2018) menambahkan bahwa pemerintah dapat dan harus membantu masyarakat. Meskipun pemerintah tidak harus selalu menjadi yang terdepan, namun peran mereka tetap penting, karena mereka tidak dapat mengabaikan ancaman yang merusak fondasi ketahanan nasional dan keamanan

nasional. Pengamatan dan temuan mereka berlaku untuk Singapura dalam memahami ancaman disinformasi dan dampaknya terhadap masyarakat.

Sebuah kerangka analisis (Lihat Gambar 1) diadopsi untuk menganalisis masalah dan sarana untuk mengatasi ancaman disinformasi dengan mempertahankan paradigma nasional, visi nasional dan konsep-konsep teoretis dengan kerangka Pertahanan Total Singapura sebagai dasarnya.



Gambar 1: Kerangka Analisis untuk Ketahanan Nasional Singapura

d. Diplomasi Negara Kecil

Sebagai negara kecil, diplomasi merupakan salah satu instrumen utama kebijakan luar negeri Singapura. Negara-negara kecil beroperasi di lingkungan ekonomi dan politik yang sama dengan negara-negara besar, sehingga tujuan yang sama mengenai kelangsungan hidup, keamanan, dan

kesuksesan sebagai negara berdaulat dapat dicapai bersama.³³ Lingkungan ini perlu berbasis aturan dan berprinsip dalam pendekatan, yang merupakan inti dari kebijakan luar negeri Singapura: (1) penghormatan terhadap kedaulatan nasional, (2) desakan pada supremasi hukum, dan (3) relevansi dengan komunitas internasional.³⁴ Ketika Singapura mengembangkan kemampuan informasinya untuk melawan disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan, diplomasi adalah instrumen yang digunakan untuk mempertahankan diri dari ancaman ini. Taskap ini akan mengkaji bagaimana diplomasi negara kecil Singapura digunakan untuk meningkatkan kemampuan informasinya dan bagaimana Singapura memperkuat kerja sama dengan negara lain dalam domain informasi.

e. **Teori Ketahanan Nasional dan Kerangka Pertahanan Total**

Berdasarkan literatur akademik Lemhannas RI, ukuran Ketahanan Nasional adalah kemampuan negara dalam menghadapi dan menyelesaikan segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan eksternal dan internal yang dapat membahayakan keutuhan dan keberlanjutan suatu negara dari segi keuletan, ketahanan, dan kekuatan bangsa.³⁵ Hal ini dianalisis melalui pendekatan delapan aspek yang disebut Asta Gatra, yang terdiri dari Tri Gatra dan Panca Gatra. Tri Gatra adalah 3 aspek alamiah, yaitu aspek geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam (SKA) yang adalah potensi dan modal bagi bangsa Indonesia pada melaksanakan pembangunan. Sedangkan Panca Gatra adalah 5 aspek sosial, yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan.

Sejalan dengan konsep rumusan kebijakan Asta Gatra ini, model Ketahanan Nasional Singapura didasarkan pada Kerangka Pertahanan Total untuk melindungi Singapura dari segala bentuk ancaman internal dan

³³ Dookeran, W., & Mohan, P.S. (2019). Small state diplomacy and global competitiveness. *Small States & Territories*, 2(1), 69-82. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/224978894.pdf>

³⁴ Public Service Division. (2015). Establishing Our Place in the World. URL: <https://www.psd.gov.sg/heartofpublicservice/our-institutions/establishing-our-place-in-the-world/>

³⁵ Tim Geostrategi dan Tannas, "Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional", (Jakarta: Lemhannas, 2023), 57-62.

eksternal. Interaksi antara 6 pilar (sosial, sipil, ekonomi, psikologis, militer dan digital) memastikan respons yang cepat dan komprehensif terhadap semua potensi ancaman internal atau eksternal yang dihadapi Singapura. Dalam taskap ini, Kerangka Pertahanan Total digunakan untuk menganalisis bagaimana ancaman disinformasi dapat berdampak pada setiap pilar dan kemampuan informasi yang dibutuhkan untuk mengatasi dan memperkuat Ketahanan Nasional Singapura.

12. **Faktor-Faktor Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh - Eksternal**

Faktor-faktor eksternal seperti ideologi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan sosial budaya memiliki pengaruh yang luas terhadap pengembangan kemampuan informasi dan ancamannya disinformasi terhadap Singapura.

a. **Aspek Ideologi – Pengaruh Eksternal dan Ekstremisme**

Indeks Terorisme Global (*Global Terrorism Index: GTI*) 2022 mengungkapkan bahwa meskipun terjadi peningkatan serangan, dampak terorisme terus menurun. Pada tahun 2021, kematian akibat terorisme turun 1,2% menjadi 7.142, sementara serangan naik 17%, menyoroti bahwa terorisme menjadi kurang mematikan.³⁶ Namun, ideologi radikalisme masih menjadi ancaman besar bagi hampir semua bangsa di dunia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika teroris dan kelompok ekstremis kekerasan baru-baru ini menggunakan disinformasi untuk menghasut dan merekrut calon teroris untuk secara sengaja menyebarkan COVID-19 dan menggunakannya sebagai bentuk senjata biologis yang diimprovisasi. Beberapa kelompok teroris telah menciptakan unit khusus yang berperan untuk memperkuat, memuliakan, dan memperkuat pesan mereka, sementara organisasi lain telah menggunakan disinformasi untuk menyebarkan ideologi ekstrem mereka, mempromosikan diri secara daring, dan memanipulasi publik.³⁷

³⁶ OCHA. (2022). Global Terrorism Index 2022, 2 Mar 2022. URL: <https://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2022>

³⁷ Reitano, T., & Trabulsi, A. (2016). Virtually Illicit: The Use of Social Media in a Hyper-Connected World. Beyond Convergence: World Without Order, Center for Complex Operations, (Washington DC: National Defence University, 2016), 215-233.

Dengan latar belakang terorisme global, jelas bahwa terorisme didorong oleh ideologi radikal dan ekstremis, yang dapat bersifat politik, agama, atau etnis. Menjadi negara multi-rasial dan multi-agama, ada banyak potensi garis patahan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok teroris dan ekstremis kekerasan dan untuk disinformasi untuk menyebarkan dan mempromosikan ideologi ekstremis dalam masyarakat di Singapura.

b. Aspek Politik – Penyebaran Nasionalisme Ekstrem dan Ketidakstabilan Politik

Dunia juga menyaksikan kebangkitan nasionalisme ekstrem. Sementara nasionalisme, patriotisme, dan kepentingan nasional tetap penting bagi negara mana pun, kecenderungan nasionalisme yang ekstrem dapat menyebabkan masalah sosial dan ketidakstabilan politik. Disinformasi mengeksploitasi kecenderungan ekstrem yang memecah belah masyarakat. Hal ini terbukti ketika Presiden US Donald Trump memenangkan pemilihan Presiden US tahun 2016 berdasarkan slogan kampanye nasionalisme "*Jadikan Amerika Hebat Lagi*" (*Make America Great Again*), dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE) merupakan bukti lain tumbuhnya nasionalisme ekstrem. Baru-baru ini, kita menyaksikan serangan di *United States Capitol Building* pada Januari tahun 2021 oleh kelompok ekstremis supremasi kulit putih untuk "*Stop the Steal*".³⁸ Kelompok-kelompok ekstremis ini didorong oleh disinformasi tentang kecurangan pemilu dalam Pemilihan Presiden US tahun 2020, di mana kemenangan "dicuri" dari mantan Presiden Donald Trump untuk masa jabatan keduanya sebagai Presiden.

Lebih dekat dengan wilayah kita, Malaysia mengadakan Pemilihan Umum ke-14 pada 9 Mei 2018 yang mengakibatkan perubahan pemerintahan dari Barisan Nasional (BN) yang memerintah sejak kemerdekaan 1957 ke koalisi Pakatan Harapan (PH), di mana banyak sarjana mengakui bahwa disinformasi dan berita palsu telah mempengaruhi

³⁸ Jeppesen, S., Hoehsmann, M., VanDyke, D., & McKee, M. (2022). *The Capitol Riots: Digital Media, Disinformation, and Democracy Under Attack*. Routledge. URL: <https://www.routledge.com/The-Capitol-Riots-Digital-Media-Disinformation-and-Democracy-Under-Attack/Jeppesen-Hoehsmann-ulthiin-VanDyke-McKee/p/book/9781032160405>

banyak pemilih.³⁹ Sayangnya, penyebaran pemikiran nasionalistik yang ekstrem telah dipercepat dengan transformasi digital, dengan berita palsu, disinformasi, dan kampanye informasi bermusuhan memperburuk masalah ini. Dengan disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan menjadi semakin umum, tren nasionalisme ekstrem yang berkembang ini diperkirakan akan terus berlanjut, yang mengarah pada lebih banyak ketidakstabilan politik di negara-negara.

c. **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan Aspek Sosial**

Transformasi digital telah mengubah cara hidup di semua negara. Ponsel pintar, perangkat seluler, jaringan bandwidth tinggi 4G dan 5G serta perangkat digital lainnya sangat canggih dan mampu melakukan semua fungsi pembangunan nasional – E-commerce, hubungan dan interaksi sosial, diskusi dan wacana politik, pendidikan, penelitian, dan keamanan dan pertahanan. Hal ini mengakibatkan penggunaan internet dunia meningkat secara signifikan dari 2,18 miliar pada tahun 2012 menjadi 4,95 miliar pada tahun 2022. Ini adalah sekitar 62,5% dari populasi dunia. Demikian pula, media sosial memiliki sekitar 4,62 miliar pengguna.⁴⁰

Lonjakan penggunaan media sosial di seluruh dunia telah memperkuat kemampuan untuk menyebarkan dan bertukar informasi. Ini telah memunculkan budaya "*Posting Dulu, Periksa Nanti*", di mana pengguna sering kali memilih untuk berbagi informasi sebelum memverifikasi keaslian informasi. Para pengguna ini juga dapat dengan mudah membentuk komunitas daring, dengan identitas mereka sendiri, minat dan perspektif bersama tentang isu-isu global perang, ekonomi, pendidikan, dan norma-norma sosial. Mereka dapat dengan cepat mempengaruhi persepsi daring tentang kebijakan pemerintah dan pembangunan nasional. Kelompok daring ini biasanya sangat sulit diatur melalui lembaga pemerintah, undang-undang, atau peraturan. Anggota komunitas ini biasanya minoritas vokal, dan

³⁹ Daud, M. (2020). Fake News in The Malaysian 14th General Election: Shall the Net Be Free Forever? *IJUM Law Journal*, 28(S1), 303-324. DOI: [https://doi.org/10.31436/iiumlj.v28i\(S1\).587](https://doi.org/10.31436/iiumlj.v28i(S1).587)

⁴⁰ Digital 2022: Another Year of Bumper Growth. *We are Social*. URL: <https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/>

menuntut tanggapan dari pemerintah. Perpecahan sosial tentang kebijakan nasional yang sensitif seperti isu *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer+* (LGBTQ+) juga menjadi isu terpolarisasi di media sosial.

Misalnya, ada gerakan daring yang sedang berlangsung oleh berbagai kelompok untuk mencabut Bagian 377A dari KUHP Singapura, yang mengkriminalisasi perilaku seksual suka sama suka antara laki-laki. Penguatan komunitas daring untuk memobilisasi dukungan melalui ruang informasi diamati dengan jelas dan telah mendapatkan daya tarik. Dengan itu Pemerintah Singapura, untuk pertama kalinya, terlibat dalam serangkaian konsultasi yang luas tentang Bagian 377A, termasuk dengan komunitas LGBTQ+ terkait dengan masalah sosial yang sensitif tersebut.⁴¹ Pada 21 Agustus 2022, Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengumumkan bahwa Pemerintah mencabut undang-undang ini, tetapi meyakinkan masyarakat bahwa pencabutan itu tidak berarti bahwa Singapura mengubah nada masyarakat. Jika masalah sosial yang sensitif seperti ini tidak ditangani dengan hati-hati, aktor yang bermusuhan dapat mengeksploitasi kesenjangan sosial ini di Singapura melalui disinformasi untuk mengikis kepercayaan pada pemerintah dan menabur perselisihan.⁴² Transformasi digital membawa banyak manfaat dan peluang, tetapi juga secara signifikan meningkatkan ancaman disinformasi yang mengeksploitasi perpecahan sosial di setiap negara di dunia. Penggunaan dan penetrasi internet akan terus tumbuh, dan disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan juga akan tetap ada.

13. **Faktor-Faktor Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh - Internal**

Ancaman disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan akan berdampak pada Pertahanan dan Ketahanan Nasional Singapura. Untuk

⁴¹ Channel NewsAsia. (2022). "Attitudes shifting on 377A but Singapore Government cannot ignore views of 'middle ground': Shanmugam", 29 Jun 2022. URL: <https://www.channelnewsasia.com/singapore/attitudes-377a-shifting-singapore-cannot-ignore-views-middle-ground-shanmugam-bbc-interview-2780991>

⁴² Channel NewsAsia. (2022). "NDR 2022: Singapore to repeal Section 377A, amend Constitution to protect definition of marriage", 21 Aug 2022. URL: <https://www.channelnewsasia.com/singapore/section-377a-repeal-law-sex-gay-men-marriage-constitution-pm-lee-ndr2022-2891381>

memahami sepenuhnya dampak tersebut, analisis ini akan mempertimbang berbagai aspek Asta Gatra:

a. **Aspek Demografi**

Singapura adalah masyarakat multi-rasial dan multi-agama. Dengan 1,64 juta orang asing yang tinggal di Singapura, yaitu sekitar 29% dari seluruh penduduk Singapura,⁴³ ini membuat Singapura menjadi target yang sangat menarik dan rentan disinformasi untuk menargetkan kohesi sosial. Sebagai negara dengan populasi terbatas, kebijakan imigrasi Singapura juga mendukung penggunaan bakat dan keahlian asing dari seluruh dunia. Ini juga menghadirkan masalah potensial bagi kohesi sosial. Upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas sosial dan koeksistensi berbagai kelompok ini, penduduk domestik dan asing, tidak boleh diremehkan. Intoleransi sosial terutama didorong oleh transformasi digital, dan disinformasi serta kampanye informasi bermusuhan akan menjadi ancaman bagi Pertahanan Nasional Singapura.

Intoleransi sosial yang besar diperkirakan tidak akan terjadi di Singapura dalam waktu dekat, namun perbedaan pendapat diperkirakan akan meningkat. Misalnya, di masa pandemi Covid-19 belakangan ini, ada orang-orang yang menyebarkan berita bohong, baik berupa video, foto, bahkan gambar-gambar saluran berita yang dipalsukan, tentang buruknya situasi di asrama TKA di Singapura untuk menimbulkan ketakutan, kepanikan, dan kepanikan. bahkan kekerasan di kalangan komunitas pekerja asing sekitar 300.000 orang.⁴⁴

b. **Aspek Geografi dan Sumber Kekayaan Alam (SKA)**

Lokasi geografis Singapura yang strategis telah memungkinkannya menjadi pusat keuangan global, tetapi ini juga membuat Singapura rentan

⁴³ Department of Statistics, Singapore. 2021.

URL: <https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/publications/cop2020/sr1/findings.pdf>

⁴⁴ The Straits Times. "Some spreading fake news about foreign worker dorms to incite violence: Shanmugam", 29 April 2020. URL: <https://www.straitstimes.com/singapore/some-people-spreading-fake-news-about-foreign-worker-dorms-to-incite-violence-shanmugam>

terhadap berita palsu dan disinformasi mengingat populasi agama dan etnis yang beragam dan akses internet yang luas. Demikian pula, Singapura merupakan negara tanpa SKA. Dengan demikian, ekonomi dan pembangunan nasional bergantung pada tenaga kerja yang sangat terampil dan terdigitalisasi, melalui penyediaan layanan dan infrastruktur yang berkualitas tinggi dan berteknologi tinggi. Karena penduduk adalah aset dan tenaga kerja terpenting Singapura, penting untuk melindungi mereka dari ancaman fisik dan melindungi mereka dari ancaman disinformasi. Pemerintah harus mempelajari kerentanan penduduk terhadap disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan, dan menyusun strategi untuk menginokulasi mereka terhadap ancaman tersebut.

c. **Aspek Ideologi**

Ideologi Nasional Singapura didasarkan pada persatuan nasional dan meritokrasi, tanpa bias terhadap agama, ras, atau kelompok etnis. Hal ini didasarkan pada keadilan dan kesetaraan, yang diartikulasikan dalam Ikrar Nasional. Namun, persatuan nasional dan kohesi sosial tetap menjadi isu sensitif. Oleh karena itu, nilai-nilai ini telah dilindungi oleh setiap generasi untuk memastikan perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan Singapura. Karena nilai-nilai ini sangat penting untuk kelangsungan hidup Singapura, penting bagi Pemerintah Singapura dan seluruh masyarakat untuk melindungi nilai-nilai ini dari segala bentuk ancaman. Disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan bertujuan untuk menciptakan perpecahan sosial, dengan memanipulasi dan mempengaruhi perilaku dan emosi seseorang dengan informasi palsu secara diam-diam, untuk mengikis Ideologi Nasional Singapura jika tidak dijaga dengan baik. Untuk melakukannya, Singapura harus membangun kapasitas dan kemampuan untuk melawan ancaman ini, dan waspada terhadap efek negatif dari berita palsu dan disinformasi pada pertahanan sosial dan psikologis penduduknya.

d. **Aspek Politik**

Sejak kemerdekaan Singapura pada tahun 1965, politik dalam negeri telah stabil di Singapura. Partai Aksi Rakyat (*PAP*) tetap menjadi partai politik

yang dominan sementara partai-partai oposisi umumnya mempraktikkan politik yang bertanggung jawab. Namun, ada pengamatan yang konsisten dan lebih sering dari kehadiran daring protes vokal tentang kebijakan pemerintah, isu-isu sosial yang sensitif dan memecah belah, dan cara hidup di Singapura. Beberapa elemen ini adalah orang asing, sementara yang lain adalah penduduk lokal. Para pemimpin politik telah menyadari pentingnya menangani perbedaan pendapat dan kekhawatiran daring. Berita palsu dan disinformasi semakin mengancam pemilihan umum yang bebas dan adil di seluruh dunia, dan ini juga merupakan norma baru dalam politik Singapura.

Misalnya, pada tahun 2017, setidaknya 13 Anggota Parlemen (*MP*) PAP, termasuk Menteri di Kantor Perdana Menteri Chan Chun Sing, telah terpengaruh oleh akun Facebook palsu dalam beberapa hari terakhir. Akun palsu ini memiliki nama anggota parlemen, foto profil, dan sampul spanduk, dengan niat jahat untuk meniru tokoh masyarakat yang dikenal dan menambah teman, dan kemudian berusaha menyebarkan berita palsu dan disinformasi.⁴⁵ Dengan kemajuan transformasi digital, berita palsu dan disinformasi akan terus menjadi ancaman bagi politik Singapura dan tren ini akan terus berlanjut.

e. **Aspek Ekonomi**

Sebagai pusat keuangan global, ekonomi Singapura sangat bergantung pada perdagangannya dengan negara lain dan investasi asing. Singapura tetap menjadi salah satu negara favorit untuk berbisnis karena model perpajakan progresif Singapura, tata pemerintahan yang bersih, dan praktik non-korupsi. Hal ini membuat kepercayaan investor menjadi sangat penting bagi Singapura. Oleh karena itu, ancaman disinformasi berpotensi mempengaruhi kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah melindungi investasi ekonomi di tingkat nasional. Baru-baru ini, ada beberapa insiden komentar dan sentimen anti-asing di media sosial. Hal ini

⁴⁵ The Straits Times. (2017). "Fake Facebook accounts created in the names of at least 13 PAP MPs", 17 Mar 2017. URL: <https://www.straitstimes.com/singapore/online-scammers-impersonating-mps-using-fake-facebook-accounts>

dapat mengikis kepercayaan investor untuk membangun bisnis mereka di Singapura, dan pada akhirnya perekonomian Singapura.

Misalnya, pada Juni 2021, pernyataan palsu beredar secara daring bahwa Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreements: FTA*) dan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Singapura-India (*Comprehensive Economic Cooperation Agreement: CECA*) telah memberikan kebebasan kepada orang asing dan Profesional, Manajer, Eksekutif, dan Teknisi India (*PMET*) untuk datang ke sini untuk bekerja di Singapura, dan mencuri pekerjaan dari orang Singapura. Baik Menteri Kesehatan Singapura *Ong Ye Kung* dan Menteri Tenaga Kerja *Tan See Leng* mengeluarkan Pernyataan Menteri di Parlemen untuk mengoreksi tuduhan palsu ini.⁴⁶ Demikian pula, ada juga beberapa kasus berita palsu yang mengarah ke komentar daring yang menghasut terhadap warga negara China yang bekerja di Singapura. Semua kejadian ini akan menimbulkan keraguan dan mengurangi kepercayaan investor terhadap Singapura jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, Singapura diharapkan meningkatkan kemampuan informasi terhadap berita palsu dan disinformasi untuk memastikan ketahanan, dan mencegah dampak negatif terhadap ekonominya untuk memastikan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.

f. **Aspek Sosial Budaya**

Salah satu prinsip utama dari disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan adalah bahwa menargetkan dan mengeksploitasi garis patahan atau perpecahan sosial-budaya suatu negara. Bagi Singapura, ideologi Nasional, nilai-nilai bersama dan harmoni sosial terintegrasi erat untuk membentuk budaya inti Singapura, yang dapat dilihat pada pilar-pilar Kerangka Pertahanan Total. Kemudahan keluhan dan keluhan sehari-hari dapat dibagikan secara daring telah menambah volume konten alternatif yang dapat diakses melalui media sosial. Perubahan dalam cara

⁴⁶ Channel NewsAsia. (2021). "Ministers to address 'false allegations' that FTAs allow foreigners 'free hand' to live and work in Singapore", 1 Jul 2021. URL: <https://www.channelnewsasia.com/singapore/singapore-fta-ministerial-statements-parliament-ceca-2001511>

penggunaan informasi berita ini berimplikasi pada cara orang Singapura, khususnya generasi muda, memahami komunitas dan lingkungan mereka.

Misalnya, pada tahun 2016, jaringan toko roti Singapura, *Prima Deli*, mengeluarkan permintaan maaf, dan memecat seorang staf yang diduga membuat pernyataan rasis kepada seorang kandidat saat wawancara kerja.⁴⁷ Dalam insiden Prima Deli, seorang pengguna Facebook mengklaim bahwa kepala departemen tempat dia melamar pekerjaan telah membuat pernyataan diskriminatif terhadapnya dan meremehkan kemampuannya. Postingan tersebut dengan cepat menjadi viral dan banyak netizen menyerukan agar perusahaan tersebut diboikot. Meskipun insiden viral ini tidak mengakibatkan keresahan sosial, mereka menonjolkan ketegangan yang dapat ditimbulkan oleh narasi bias yang dipicu oleh spekulasi yang tidak berdasar pada tatanan sosial Singapura.⁴⁸ Dengan demikian, berita palsu dan disinformasi akan terus menjadi tantangan yang lebih besar bagi Singapura.

g. **Aspek Pertahanan dan Keamanan**

Disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan dapat mempengaruhi warga Singapura dan kepercayaan mereka pada lembaga publik. Saat ini, selain front keamanan udara, darat, laut, dan internal tradisional, disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan adalah “musuh tak terlihat” yang diperjuangkan dalam domain digital. Ketidakmampuan untuk mengelola dan bertahan melawan “musuh tak terlihat” dari serangan informasi dapat melumpuhkan kredibilitas dan kemampuan SAF dan badan keamanan lainnya. Misalnya, ada beberapa insiden berita palsu tentang Kepolisian Singapura (SPF) yang mengancam kredibilitas dan integritasnya. SAF sebagian besar merupakan pasukan wajib militer Layanan Nasional, dan dukungan publik untuk layanan nasional dan

⁴⁷ The Straits Times. (2016). “Prima Deli apologises, sacks staff for making racist remarks to job interviewee”, 29 Apr 2016. URL: <https://www.straitstimes.com/singapore/manpower/primadeli-apologises-sacks-staff-for-making-racist-remarks-to-job-interviewee>

⁴⁸ Neubronner, S. (2017). Social Media and “Fake News”: Impact on Social Cohesion in Singapore. S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), 43. URL: <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/03/CO17043.pdf>

komitmen terhadap pertahanan nasional adalah yang terpenting. Namun, semakin banyak orang yang menggunakan media sosial dan berita palsu untuk mencoba melemahkan dukungan terhadap SAF.

Oleh karena itu, Singapura harus memiliki kemampuan informasi yang diperlukan untuk dapat mempertahankan diri dan penduduknya dari disinformasi yang dapat mempengaruhi beberapa aspek penting dari negara Singapura. Informasi tentang rencana pembangunan nasional dan kemampuan untuk melawan disinformasi dalam aspek pertahanan dan keamanan terbatas pada bahan sumber terbuka yang dicakup.



BAB III PEMBAHASAN

14. Umum

Bab ini akan membahas secara rinci pendekatan yang komprehensif, holistik dan terintegrasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan informasi untuk memperkuat Ketahanan Nasional Singapura terhadap disinformasi. Bab ini membahas status undang-undang dan peraturan saat ini yang berkaitan dengan tata kelola terhadap disinformasi, lembaga dan struktur yang dibentuk untuk mengatasi ancaman disinformasi, kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk melawan disinformasi, keahlian SDM dalam domain informasi, pendidikan dan kesadaran dalam masyarakat, dan kerja sama regional dan internasional saat ini dalam domain informasi. Dengan menggunakan kerangka teori (Gambar 1) yang dirumuskan pada Bab II dan teori-teori inti yang telah dibahas sebelumnya, bab ini juga akan menganalisis isu, tantangan dan kesenjangan terkait dengan 6 pilar Pertahanan Total Singapura.

Terakhir, bab ini akan ditutup dengan Analisis Isu-isu Kunci untuk memberikan serangkaian rekomendasi yang bertujuan untuk mengoperasionalkan strategi jangka panjang, nama "Merasakan, Menghalangi, Berkolaborasi" (***Sense, Deter, Collaborate***) untuk mengembangkan kemampuan informasi Singapura. Strategi ini harus mempertimbangkan secara komprehensif (1) perundang-undangan dan kebijakan, (2) organisasi dan struktur, (3) keahlian sumber daya manusia (SDM), (4) pendidikan dan kesadaran masyarakat, dan (5) kerja sama nasional dan internasional. Strategi ini akan terdiri dari rencana Tata Kelola Informasi Responsif dan Dinamis (***Responsive and Dynamic Info Governance***) untuk disinformasi, Kemitraan 5 Sisi antara pemerintah, masyarakat, institusi swasta, perusahaan media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (***Penta-Helix Info-Partnership***), ekosistem Keahlian Informasi (***Info-expertise Ecosystem***) dan Tenaga Kerja Informasi (***Info Practitioners and Workforce***), Kesadaran dan Kesiapan Informasi (***Info Awareness and Readiness***), dan Diplomasi Informasi (***Info Diplomacy***) sebagai bagian dari memperkuat Ketahanan

Nasional Singapura terhadap disinformasi, dan mencapai tujuan nasional untuk Kelangsungan Hidup, Keamanan, Kesuksesan.

15. **Optimalisasi Peraturan Perundang-Undangan Dan Perangkat Hukum untuk Mendukung Penguatan Dan Pengembangan Kemampuan Informasi**

Singapura tidak sendirian dalam memilih jalan pencegahan melalui undang-undang untuk memerangi disinformasi. Sejumlah negara termasuk Jerman, Prancis, dan Thailand telah memperkenalkan undang-undang yang memberi otoritas lebih banyak kekuasaan eksekutif untuk mencegah berita palsu, memungkinkan mereka untuk memaksa platform media sosial, situs web, dan penerbit untuk menghapus konten palsu.⁴⁹ Sebelum pengenalan baru-baru ini dari 2 undang-undang untuk memerangi disinformasi [UU Perlindungan Dari Kepalsuan Daring dan Manipulasi Tahun 2019 (POFMA), dan UU Interferensi Asing (Penanggulangan) Tahun 2021 (FICA)], ada beberapa undang-undang dan kebijakan utama yang mendukung lanskap digital dan informasi Singapura.

UU Otoritas Pengembangan Info-Komunikasi Singapura Tahun 2016⁵⁰ (RUU nomor 22 tahun 2016) dan UU Telekomunikasi (Bab 323)⁵¹ saat ini mengatur penggunaan info-komunikasi di Singapura. Kedua undang-undang tersebut mencakup berbagai aspek perkembangan Info-Komunikasi di Singapura. Di bawah UU Telekomunikasi, mengirimkan pesan yang sengaja palsu merupakan pelanggaran. Namun, undang-undang saat ini lebih fokus pada promosi Teknologi Info-Komunikasi di Singapura, sedangkan penyalahgunaan media dan informasi masih diatur oleh bagian lain dari Konstitusi termasuk Pasal 12, yang mengatur kesetaraan dan ketertiban sosial. Undang-undang lama ini mencakup masalah yang lebih luas dari penyalahgunaan teknologi informasi dan tidak secara khusus tentang masalah disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan.

⁴⁹ Chua, R. (2021). Looking Beyond POFMA to Combat Fake News and Misinformation in Singapore. Singapore Policy Journal. URL: <https://spj.hkspublications.org/2021/10/24/looking-beyond-pofma-to-combat-fake-news-and-misinformation-in-singapore/>

⁵⁰ Singapore Statutes Online. "Info-communications Media Development Authority Act 2016", 7 Aug 22. URL <https://sso.agc.gov.sg/Act/IMDAA2016>

⁵¹ Singapore Statutes Online. "Telecommunications Act 1999", 7 Aug 22. URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/TA1999>

Menyadari meningkatnya ancaman disinformasi yang berasal dari dunia maya, UU Keamanan Siber diperkenalkan pada 5 Februari 2018. Ini menetapkan kerangka peraturan bagi pemilik infrastruktur informasi publik dan swasta yang penting untuk memantau dan melaporkan semua ancaman keamanan siber. Undang-undang ini memberi wewenang kepada Komisararis Keamanan Siber untuk menyelidiki ancaman dan insiden keamanan siber untuk menentukan dampaknya dan mencegah timbulnya bahaya atau insiden keamanan siber lebih lanjut. Kekuasaan yang dapat digunakan dikalibrasi sesuai dengan tingkat keparahan ancaman atau insiden keamanan siber dan tindakan yang diperlukan untuk merespons. Ini memastikan bahwa Pemerintah Singapura dapat merespons secara efektif ancaman keamanan siber dan menjaga keamanan Singapura dan warga Singapura.⁵² Ini sangat penting karena berita palsu dan disinformasi biasanya berkembang biak melalui dunia maya, dan undang-undang semacam itu diperlukan untuk menegakkannya. Oleh karena itu, UU Perlindungan Dari Kepalsuan Daring dan Manipulasi Tahun 2019 (POFMA) dan UU Interferensi Asing (Penanggulangan) Tahun 2021 (FICA) diperkenalkan untuk (1) memerangi penyebaran dan pengaruh berita palsu dan disinformasi yang dapat menyebabkan kerugian serius melalui erosi kepercayaan pada lembaga publik dan pemilu, menghasut kekacauan publik, dan campur tangan dalam kebijakan nasional; dan (2) untuk mencegah, mendeteksi dan mengganggu campur tangan asing dalam politik domestik kita yang dilakukan melalui kampanye informasi bermusuhan dan penggunaan proxy lokal.

Ada beberapa masalah dengan undang-undang dan kebijakan yang ada. **Pertama**, penerapan POFMA 2019 baru harus progresif, karena undang-undang ini adalah yang pertama di kawasan ASEAN, dan hanya sedikit negara lain yang telah menerapkan undang-undang serupa secara global.⁵³ Proses dan prosedur hukum yang relevan harus dikembangkan sesuai untuk mencegah salah tafsir POFMA 2019, yang dapat mengakibatkan proses hukum yang panjang dan memberatkan antara Pemerintah Singapura dan netizen daring. Selain itu, POFMA 2019 hanya

⁵² Cyber Security Agency of Singapore (CSA). Cybersecurity Act. URL: <https://www.csa.gov.sg/legislation/cybersecurity-act>

⁵³ Bloomberg News. (2019). "Singapore's Fake News Bill Set to Become Law in Second Half of Year", 15 Apr 2019. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-15/singapore-s-fake-news-bill-to-take-effect-in-second-half-of-2019#xj4y7vzkg>

berlaku di Singapura. Individu yang membuat pernyataan palsu secara daring dari luar Singapura, tidak tunduk pada yurisdiksi ini. Dengan demikian, metode mitigasi lain akan diperlukan untuk menangani disinformasi tersebut. Sebagai bagian dari implementasi POFMA 2019, Pemerintah Singapura juga harus berhati-hati untuk tidak mendelegasikan 'kekuasaan berlebihan kepada para Menteri dan Kementerian' untuk menyerang media bebas dan sumber informasi daring, yang bercita-cita untuk mendukung dan menegakkan demokrasi dan kebebasan berbicara di Singapura.

Kedua, implementasi FICA 2021 baru juga harus progresif karena Singapura adalah negara pertama di Asia Tenggara yang memberlakukan undang-undang semacam itu di tengah meningkatnya kekhawatiran global tentang disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan, dan undang-undang ini tampaknya memberi banyak kekuatan untuk otoritas. Di bawah FICA 2021, Menteri Dalam Negeri akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan arahan kepada berbagai entitas media atau individu untuk membantu pihak berwenang menyelidiki dan melawan kampanye informasi bermusuhan yang berasal dari luar negeri. Platform media sosial dapat diarahkan oleh Pemerintah untuk menonaktifkan atau membatasi fungsi yang memungkinkan konten berbahaya menjadi viral. Dalam ukuran yang lebih ekstrem, Pemerintah dapat memerintahkan layanan distribusi aplikasi, seperti toko Apple atau Google terkait, untuk memblokir aplikasi yang digunakan untuk campur tangan asing agar tidak diunduh di Singapura. Beberapa orang akan melihat ini sebagai ancaman terhadap kebebasan berbicara dan demokrasi jika tidak diterapkan dan dikomunikasikan dengan benar. Demikian pula, menegakkan FICA 2021, jika asal-usul disinformasi berasal dari luar negeri, akan menjadi tantangan mengingat yurisdiksi yang berbeda lintas batas negara.

Ketiga, karena alasan yang dibahas di atas, kriteria untuk menjalankan dan menegakkan POFMA 2019 dan FICA 2021 sangat tinggi sehingga berita palsu atau disinformasi yang berada di bawah standar tinggi ini tidak dapat dicegah. Harus ada pedoman pidana yang jelas dalam menghadapi penyebaran disinformasi, hal ini akan menghambat tindakan tersebut sebelum dilakukan. Pedoman pidana yang

jelas juga akan membantu sistem hukum untuk menjatuhkan hukuman yang sepadan dengan penyebaran disinformasi.

a. **Solusi Hasil Analisis – Tata Kelola Informasi Responsif dan Dinamis (*Responsive and Dynamic Info Governance*)**

Berdasarkan analisis di atas, diperlukan Tata Kelola Informasi Responsif dan Dinamis untuk disinformasi agar dapat bereaksi secara responsif dan beradaptasi dengan lingkungan informasi yang dinamis, serta kebutuhan dan keprihatinan masyarakat. Revisi yang sering terhadap undang-undang dan kebijakan yang terkait dengan informasi harus diharapkan agar tetap relevan. Pemerintah Singapura juga perlu menciptakan peluang untuk melibatkan publik dalam kebijakan dan undang-undang. Proses konsultatif ini memastikan bahwa hak-hak sipil dan masalah sosial masyarakat Singapura ditangani dengan tepat. Ini sangat penting karena Aspek Pertahanan Sipil di bawah Kerangka Pertahanan Total didukung oleh kepercayaan penuh antara pemerintah, bisnis swasta, dan warga negara.

Tata Kelola Informasi Responsif dan Dinamis dapat memperkuat legislasi dan kebijakan untuk mengatur dan mengatasi disinformasi memastikan bahwa paradigma dan visi nasional ditegakkan dan dipertahankan. Alih-alih menciptakan lebih banyak institusi, tata kelola dan penegakan hukum yang lebih ketat akan mengoptimalkan penegakan hukum ini untuk mengatasi disinformasi. Model Tata Kelola Informasi Responsif dan Dinamis ini harus memfasilitasi siklus umpan balik yang responsif antara pemerintah, perusahaan, dan warga negara, untuk membentuk persatuan nasional yang lebih kuat dan kepercayaan yang lebih besar. Model baru ini akan memungkinkan pembuatan kebijakan yang responsif oleh Pemerintah, dan memastikan undang-undang dan peraturan yang ada untuk mengimbangi lingkungan informasi yang dinamis. Hal ini untuk menjamin daya saing ekonomi, Keamanan dan Ketahanan Nasional. Undang-undang dan kebijakan yang responsif dan efektif untuk memerangi berita palsu akan menjadi pencegah yang kuat.

Pertama, undang-undang berita palsu seperti POFMA dan FICA harus secara jelas mendefinisikan apa itu berita palsu dan komunikasi undang-undang tersebut harus komprehensif. Akan ada individu dan kelompok yang akan menafsirkan beberapa berita palsu sebagai sindiran atau lelucon yang tidak berbahaya, diedarkan tanpa niat jahat. Namun, dampak negatif dari disinformasi berbahaya dan memiliki efek “tetesan lambat” pada Ketahanan Nasional Singapura. Oleh karena itu, mungkin sulit bagi masyarakat untuk melihat arus bawah ketidaknyamanan sosial ketika beberapa berita palsu melibatkan isu-isu sensitif termasuk ras dan agama. Saat ini, pemahaman masyarakat terhadap berita palsu jelas masih belum terlalu jelas. Hal ini penting untuk pembentukan undang-undang dan penegakan hukum sehingga masyarakat tahu jenis berita palsu yang beredar kemungkinan akan mengakibatkan tuntutan hukum, sementara yang lain mungkin masih memenuhi syarat sebagai tidak berbahaya. Pemahaman ini harus dikomunikasikan dengan jelas.

Kedua, untuk menjadi alat pencegah yang efektif, baik POFMA maupun FICA harus dapat memungkinkan penuntutan baik pelaku disinformasi domestik maupun asing terhadap Singapura yang diatur dari luar perbatasan Singapura. Ketidakmampuan untuk membawa pelaku asing ke tugas akan menjadi celah potensial bagi hukum karena para pelaku ini mungkin memilih untuk melakukan disinformasi atau kampanye informasi bermusuhan terhadap Singapura dari luar negeri. Jika undang-undang tidak memungkinkan penuntutan pelaku tersebut, dengan bantuan negara tuan rumah, maka FICA pada dasarnya tidak berguna dan tidak efektif. Oleh karena itu, kerjasama internasional dan regional melalui diplomasi informasi dapat menjadi pengaktif untuk memperkuat penegakan FICA, yang akan dibahas selanjutnya.

Ketiga, penegakan POFMA dan FICA harus cepat dan efektif. Akan ada banyak pengamat untuk melihat bagaimana Pemerintah menerapkan POFMA dan FICA, terutama penuntutan terhadap beberapa pelanggar pertama dari undang-undang ini. Ini akan menjadi prioritas untuk

kasus-kasus berikutnya. Implementasi yang baik dari undang-undang ini akan mencapai efek yang diinginkan untuk menghalangi pelaku di masa depan, sementara implementasi yang lemah akan mendorong mereka untuk menguji batas-batas undang-undang ini. Oleh karena itu, jika ada kasus berita palsu atau dugaan disinformasi, pelakunya harus diproses secara cepat dan adil.

Untuk dapat secara responsif dan dinamis mendeteksi dan merespons berita palsu dan disinformasi serta menganiaya para pelakunya, diperlukan deteksi dini dan identifikasi berita palsu secara dini sebelum memperoleh daya tarik. Metode saat ini yang digunakan untuk mendeteksi berita palsu sangat padat karya dan memakan waktu. Ini akan membutuhkan solusi teknologi karena penyebaran disinformasi terjadi di ruang siber dengan sangat cepat. Namun, karena teknologi tersebut berkembang sangat cepat, tidak berguna untuk menentukan kemampuan khusus di sini. Sebaliknya, segmen ini akan menguraikan bidang-bidang yang harus difokuskan dan digunakan oleh solusi teknologi. Penggunaan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan Data Analytics untuk mendeteksi berita palsu sejak dini sangat penting. Untuk mencegah penyebaran berita palsu sebelum menjadi viral, diperlukan kemampuan penginderaan dan pemantauan informasi yang baik. Meskipun tidak mungkin mendeteksi berita palsu sebelum diposting atau diedarkan, deteksi dini dapat membatasi penyebaran dan dampak berita palsu. Namun, pengembangan teknologi AI dan Data Analytics masih dalam tahap awal, oleh karena itu masih diperlukan "man-in-the-loop" saat menggunakan teknologi tersebut. Pertimbangan utama untuk sistem penginderaan dan pemantauan yang sedang dikembangkan adalah (1) kebutuhan pusat data untuk menyimpan volume besar data yang diperoleh dari ruang informasi, dan (2) potensi masalah privasi data dari masyarakat. Mencapai keseimbangan yang tepat antara keamanan data dan melawan disinformasi akan menjadi tantangan berkelanjutan antara Pemerintah dan masyarakat.

16. **Optimalisasi Instansi Operasional Utama Yang Telah Dibentuk Untuk Berkontribusi Pada Pengembangan Kemampuan Informasi Yang Optimal**

Ada beberapa organisasi dan struktur di Singapura yang membentuk arsitektur holistik untuk mengembangkan, mengelola, dan mengatur kemampuan informasi Singapura. Kementerian Komunikasi dan Informatika (MCI) adalah lembaga pemerintah yang “mengawasi perkembangan teknologi infokom, keamanan siber, dan sektor media; perpustakaan nasional, arsip nasional, dan perpustakaan umum; serta kebijakan informasi dan komunikasi publik Pemerintah”.⁵⁴ MCI mengawasi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) di Singapura, serta mengatur media tradisional seperti radio siaran, televisi, publikasi berita cetak, dan media digital daring. Dengan maraknya berita palsu dan disinformasi, MCI telah memperluas perannya secara signifikan untuk juga diamanatkan untuk perumusan kebijakan dan strategi melawan berita palsu dan disinformasi dengan dibentuknya Infocomm Media Development Authority (IMDA) di dalam MCI pada Oktober 2016. IMDA berkembang dan mengatur konvergensi sektor infokom dan media secara holistik, dan juga berupaya untuk memperdalam kemampuan regulasi untuk sektor media infokom yang konvergen, menjaga kepentingan konsumen dan mendorong regulasi yang pro-perusahaan.⁵⁵ Selain MCI yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan dan strategi, Kementerian Dalam Negeri (MHA) terlibat dalam penegakan hukum terkait berita palsu dan disinformasi.

Dalam Aspek Pertahanan Militer, MINDEF mengumumkan pembentukan layanan keempat untuk Angkatan Bersenjata Singapura (SAF), Layanan Digital dan Intelijen (DIS) pada Oktober 2022. Pasalnya, ranah digital, seperti halnya udara, darat, dan laut telah menjadi medan pertempuran yang jika dibiarkan dapat berdampak pada keamanan dan kedaulatan suatu negara. "Wajah perang" juga berubah, mengingat meningkatnya prevalensi ancaman dunia maya dan penggunaan disinformasi.⁵⁶ DIS mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan

⁵⁴ Ministry of Communications and Information (MCI). (2022). Our Organisation. URL: <https://www.mci.gov.sg/about-us>

⁵⁵ Infocomm Media Development Authority (IMDA). (2022). About IMDA. URL: <https://www.imda.gov.sg/Who-We-Are/about-imda>

⁵⁶ Channel NewsAsia. (2022). “Army, Air Force, Navy and soon, digital and intelligence: SAF to launch 4th service to deal with new threats”, 2 Mar 2022. URL:

Kommand, Kontrol, Kcommunications, Komputers and Intelijen (C4I) yang ada serta kemampuan cyber SAF. Sebagai Layanan khusus, DIS akan meningkatkan, melatih, dan mempertahankan kekuatan dan kemampuan digital untuk memenuhi misi mereka mempertahankan perdamaian dan keamanan Singapura dari ancaman yang berkembang dan semakin kompleks dalam domain digital, termasuk ancaman disinformasi⁵⁷ (Lihat Gambar C-6 di Lampiran C). Menjadi organisasi baru dengan struktur dan entitas operasional, DIS perlu membangun proses dan hubungan yang diperlukan untuk bekerja sama dengan lembaga dan organisasi lain, seperti MHA, MCI, IMDA, dan lembaga Seluruh Pemerintah lainnya untuk memberikan pertahanan yang kuat terhadap disinformasi.

Karena disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan bersifat kompleks, proses dan hubungan antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan yang diperlukan untuk mengatasi ancaman ini harus berada pada tingkat yang optimal. Diperlukan upaya terkoordinasi antara MCI, IMDA, MHA, MINDEF, dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah lainnya untuk melindungi Singapura dari disinformasi. **Pertama**, tidak ada satu pun lembaga yang memimpin upaya keseluruhan dalam mengatasi disinformasi di Singapura. Cakupan akuntabilitas ini sangat besar dan mungkin memerlukan lembaga yang berdedikasi dan terpusat untuk mengatasi ancaman disinformasi karena ini adalah masalah yang kompleks. Badan yang ditunjuk kemudian dapat menangani masalah ini dengan cara yang lebih terencana dan spesifik dengan sumber daya yang terfokus.

Kedua, mengingat sifatnya yang kompleks, mengatasi ancaman disinformasi memerlukan spektrum kemampuan yang luas untuk (1) mendapatkan informasi dengan cepat tentang penyebaran berita palsu dan disinformasi, (2) melakukan operasi segera untuk mengelola risiko dan dampak berita palsu, dan (3) pelibatan berkala Instansi terkait seperti berbagai platform teknologi dan masyarakat umum. **Ketiga**, kurangnya partisipasi lembaga dan masyarakat non-

<https://www.channelnewsasia.com/singapore/saf-digital-intelligence-fourth-service-ng-eng-hen-2532456>

⁵⁷ MINDEF. (2022). Fact Sheet: The Digital and Intelligence Service. URL: https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/news-and-events/latest-releases/article-detail/2022/October/28oct22_fs

pemerintah dalam organisasi dan struktur ini. Menanggulangi berita palsu dan disinformasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan pejabat pemerintah, tetapi merupakan upaya seluruh masyarakat. Ini akan mencakup koordinasi dan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat, instansi pemerintah, media tradisional dan media sosial, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, diperlukan lembaga pusat untuk mengoordinasikan upaya-upaya ini dan melakukan pelibatan secara teratur kepada para pemangku kepentingan ini sehingga semua kelompok masyarakat harus dilibatkan untuk memastikan inklusivitas seluruh masyarakat.

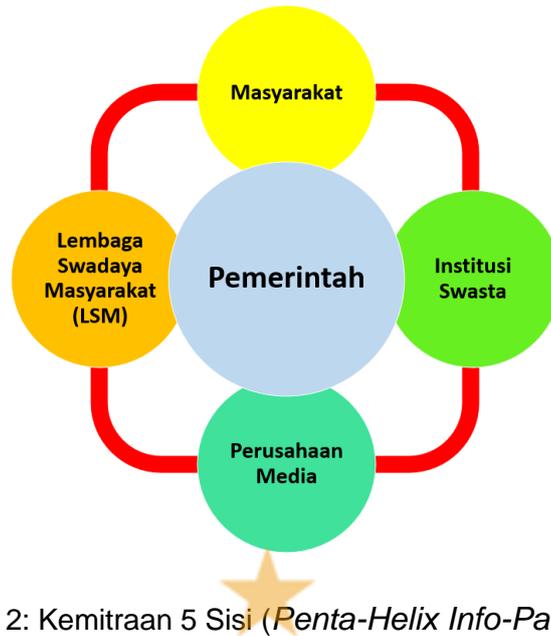
a. **Solusi Hasil Analisis – Pembentukan Kemitraan 5 Sisi (*Penta-Helix Info-Partnership*)**

Berdasarkan analisis di atas, Kemitraan 5 Sisi antara pemerintah, masyarakat, institusi swasta, perusahaan media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (namanya: ***Penta-Helix Info-Partnership***) harus dibentuk untuk memastikan kepentingan semua lembaga dan pemangku kepentingan dapat terwakili dengan baik. Ini akan memperkuat pertahanan sipil dan kepercayaan masyarakat karena kemampuan informasi melawan disinformasi akan mempertimbangkan kebutuhan semua pemangku kepentingan. Kepercayaan antara warga dan lembaga pemerintah memainkan peran kunci dalam meningkatkan ketahanan masyarakat. Melibatkan publik dan melibatkan mereka dalam kesiapsiagaan dan ketahanan sipil secara teratur adalah cara paling efektif untuk menginokulasi masyarakat terhadap disinformasi. Peran warga negara dalam mendukung pertahanan nasional dan kolektif terhadap disinformasi perlu diakui dan diberdayakan. Kemitraan yang kuat tersebut juga memberikan “efek jera” yang dilandasi oleh persatuan bangsa dalam menghadapi ancaman internal dan eksternal.

Meskipun ada banyak lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang menangani ancaman disinformasi, seharusnya ada satu entitas yang diberi mandat untuk memimpin upaya keseluruhan dalam memerangi disinformasi di Singapura. **Pertama, Satuan Tugas Respons Informasi Nasional**

(National Information Response Task Force) untuk melawan berita palsu dan disinformasi harus dibentuk. Satuan Tugas ini harus terdiri dari entitas dari berbagai lembaga (seperti MCI, IMDA, MHA, MINDEF, DIS, dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah lainnya) dengan kemampuan informasi masing-masing untuk dibawa ke meja. Sebagai catatan, pembentukan dan koordinasi yang erat dalam Satuan Tugas ini sangat penting dalam memerangi berita palsu karena ancaman disinformasi adalah masalah kompleks yang melintasi berbagai isu dan bidang dari berbagai instansi. Rantai komando dan kontrol dan pelaporan yang jelas harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga pemangku kepentingan dan entitas yang terlibat harus menyetujui aturan keterlibatan, tindakan yang harus diambil dalam jangka waktu tertentu dan memiliki persyaratan tanggung jawab yang jelas di antara mereka sendiri. Isu “turf-guarding” antar lembaga harus dihindari, dan pengembangan kemampuan berbagi informasi dan sinergi harus dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya dan membangun kepercayaan. Pembentukan Satuan Tugas Respons Informasi yang baru dan dapat dipesan lebih dahulu ini juga dapat menyediakan pusat pengetahuan terpusat untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat manajemen pengetahuan tentang disinformasi, atau tempat untuk mengarahkan pertanyaan yang relevan.

Memerangi disinformasi dan berita palsu bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan pejabat pemerintah. Ini akan membawa koordinasi dan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan termasuk lembaga swasta, instansi pemerintah, perusahaan media, LSM, dan masyarakat. **Kedua, pembentukan Penta-Helix Info-Partnership antara pemerintah, masyarakat, institusi swasta, perusahaan media dan LSM akan memungkinkan keterlibatan reguler dengan para pemangku kepentingan ini untuk membangun kepercayaan menyempurnakan kebijakan, memperkuat pertukaran informasi, strategi, dan pengetahuan teknis untuk memerangi disinformasi (Lihat Gambar 2).**



Gambar 2: Kemitraan 5 Sisi (*Penta-Helix Info-Partnership*)

Kemitraan ini juga akan memungkinkan pembangunan ekosistem pengecekan fakta yang kuat yang sangat penting untuk meningkatkan Kesadaran dan Kesiapan Informasi. Ini karena pemeriksaan fakta berkualitas tinggi membutuhkan banyak sumber daya, dan pemeriksa fakta sulit bekerja sendiri. Oleh karena itu, Penta-Helix Info-Partnership akan mendorong kolaborasi antara pemerintah, perusahaan teknologi dan media, serta akademisi untuk berbagi praktik terbaik dan bertukar pengetahuan, yang penting untuk memerangi disinformasi.

Ketiga, sebagai bagian dari kemitraan ini, keterlibatan rutin tokoh media atau pemberi pengaruh media sosial akan memiliki manfaat signifikan lainnya dalam memerangi disinformasi. Orang-orang ini, dapat menjadi advokat pihak ketiga, yang memahami ancaman disinformasi pada pertahanan psikologis dan sosial Singapura. Dalam mengenali peran yang semakin penting dari para pemimpin opini daring ini, pemerintah harus secara teratur melibatkan dan mendorong para pemberi pengaruh media sosial ini untuk memerangi berita palsu dan disinformasi dengan mempromosikan persatuan dan komitmen dalam memerangi disinformasi. Beberapa pemimpin negara seperti Presiden Indonesia Joko Widodo telah mendorong influencer media sosial untuk

meningkatkan perang melawan berita palsu dengan menggunakan berbagai platform komunikasi secara bertanggung jawab karena meningkatnya intensitas disinformasi di media sosial.⁵⁸

17. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Di Bidang Informasi**

Karena domain informasi adalah bidang baru dan sedang berkembang, investasi dalam institusi dan struktur, dan kemampuan saja tidak akan cukup untuk menangani disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan. Keahlian sumber daya manusia saat ini di bidang ini masih baru lahir. Ada kebutuhan untuk memprofesionalkan inti praktisi dan tenaga kerja informasi, dan memberikan akreditasi dan kualifikasi yang diperlukan bagi orang-orang yang bergabung di bidang informasi. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia kami di Singapura, akan ada kebutuhan untuk memaksimalkan potensi praktisi info dan tenaga kerja yang tersedia untuk mengatasi kebutuhan palsu dan disinformasi dengan (1) meningkatkan penggunaan teknologi untuk pemindaian ruang digital untuk potensi disinformasi ancaman, (2) membekali praktisi info dengan keterampilan masyarakat untuk melibatkan masyarakat dan juga melakukan manajemen konsekuensi ketika konsekuensi disinformasi menjadi serius. Tantangannya, soft skill seperti psikologi perilaku manusia tidak bisa dipelajari hanya melalui pendidikan. Hal ini sering didasarkan pada kepribadian. Oleh karena itu, tantangannya adalah mengidentifikasi dan mempekerjakan orang dengan pekerjaan yang tepat dan sesuai yang dibutuhkan untuk mengelola ancaman disinformasi di Singapura.

Pertama, ada kekurangan segera keahlian SDM yang relevan dalam domain informasi. Menurut survei yang dilakukan oleh IMDA, jumlah Profesional Media Infocomm⁵⁹ yang dipekerjakan adalah 220.800 pada tahun 2018. Bersama dengan 20.000 lowongan pekerjaan Media Infocomm, total permintaan Profesional Media Infocomm adalah 240.800 pada tahun 2018. Permintaan untuk Profesional Media

⁵⁸ The Jakarta Post. (2017). "Jokowi tells social media influencers to step up fight against fake news", 24 Aug 2017. URL: <https://www.thejakartapost.com/news/2017/08/24/jokowi-tells-social-media-influencers-to-step-up-fight-against-fake-news.html>

⁵⁹ Seorang Profesional Media Infokom mengacu pada orang yang terlibat dalam pekerjaan terkait infokom atau seseorang dengan peran pekerjaan konten media tertentu yang dipekerjakan di sebuah perusahaan lintas sektor.

Infocomm diproyeksikan akan tumbuh oleh 68.000 lainnya dalam tiga tahun ke depan dari 2019 hingga 2021. Meskipun ada permintaan dalam domain informasi, ada tren yang berkembang bagi generasi muda untuk memilih ilmu sosial, keuangan, dan studi terkait bisnis di Singapura. Ada kebutuhan bagi Singapura untuk memberi insentif dan mendorong lebih banyak orang untuk mengambil karir di bidang yang berhubungan dengan informasi untuk memaksimalkan sumber daya manusia di bidang ini.

Kedua, terkait dengan kurangnya keahlian SDM adalah tantangan dalam merekrut talenta terbaik untuk mengembangkan kemampuan informasi melawan disinformasi. Identifikasi dan perekrutan bakat harus dimulai di lembaga pendidikan tinggi dan berlanjut sepanjang pengembangan karir awal semua orang Singapura. Sebagai negara dengan populasi kecil, perekrutan basis tenaga kerja informasi yang lebih besar akan membutuhkan waktu. Dengan demikian, upaya harus dimulai dengan cepat dan ditargetkan untuk implementasi yang stabil selama satu dekade penuh. Pemerintah harus menyediakan dana dan dukungan yang diperlukan bagi institusi swasta dan perusahaan untuk bersaing mendapatkan talenta dan SDM terbaik baik secara regional maupun global agar tetap kompetitif. Ini akan memastikan bahwa Singapura akan membangun ekosistem Keahlian Informasi (***Info-expertise Ecosystem***) yang kuat dan Tenaga Kerja Informasi (***Info Practitioners and Workforce***) yang terlatih dan kompeten.

Ketiga, untuk memastikan Singapura siap menghadapi ancaman disinformasi, hal terpenting yang harus dilakukan adalah membekali tenaga kerja dengan keterampilan dan keahlian yang diperlukan sehingga mereka dapat dipekerjakan di industri, meningkatkan lapangan kerja, dan memperkuat negara dalam berbagai aspek Pertahanan Total.

a. **Solusi Hasil Analisis – Ekosistem Keahlian Informasi (*Info-expertise Ecosystem*) dan Tenaga Kerja Informasi (*Info Practitioners and Workforce*)**

Berdasarkan analisis di atas, Ekosistem Keahlian informasi yang kuat dan Tenaga Kerja Informasi yang terlatih dan kompeten akan

mempersiapkan Singapura untuk menghadapi ancaman disinformasi. Selain membangun infrastruktur pendukung yang diperlukan, sangat penting untuk mempersiapkan orang-orang dengan pemahaman dan keahlian yang kuat dalam melawan berita palsu dan disinformasi di setiap aspek pekerjaan untuk memastikan Keamanan, Kelangsungan hidup, dan Kesuksesan Singapura. Dengan persaingan global yang ketat untuk talenta terbaik di bidang ini, Singapura juga perlu secara bersamaan fokus mengembangkan talenta dan keahlian kami sendiri secara nasional. Info Praktisi dan Tenaga Kerja yang lengkap akan memperkuat Pertahanan Ekonomi, Psikologis dan Sosial Singapura terhadap disinformasi, menjaga Ketahanan Nasional Singapura.

Investasi dalam institusi, struktur, dan teknologi tidak cukup untuk memerangi disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan. Membangun kemampuan informasi yang disebutkan, perlu juga membangun keahlian SDM dalam bidang informasi. Untuk memperkuat Ketahanan Nasional Singapura terhadap disinformasi adalah kebutuhan untuk memiliki Ekosistem Keahlian Informasi yang kuat, yang dimungkinkan oleh Praktisi Informasi terlatih dan tenaga kerja Informasi.

Pertama, Pemerintah perlu bekerja dengan layanan publik dan perusahaan swasta untuk meningkatkan daya tarik pekerjaan yang terkait dengan informasi, yang mencakup penyediaan pelatihan yang berkualitas, akreditasi dan kualifikasi yang diperlukan bagi orang-orang yang bergabung dengan Tenaga Kerja Informasi. Dengan cara ini, pekerjaan yang terkait dengan bidang informasi diprofesionalkan dan dikenali dengan benar untuk membentuk inti praktisi informasi. Menurut Hirarki Kebutuhan Maslow, kebutuhan dasar seorang individu masih menjadi motivasi pertama dan terbesar. Meskipun, orang mungkin melihat pentingnya pekerjaan yang berhubungan dengan informasi, mereka hanya akan tertarik untuk bergabung dengan Tenaga Kerja Informasi ketika remunerasinya cukup menarik dan pengakuannya baik untuk sektor ini. Oleh karena itu,

pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menarik yang terbaik ke dalam domain ini.

Kedua, masing-masing pemberi kerja harus mengembangkan rencana pelatihan yang tepat untuk memiliki rute kemajuan dan peluang kemajuan karir yang jelas bagi praktisi informasi untuk memastikan karyawan terpapar pada praktik terbaik yang berbeda dan mendapatkan pengalaman yang lebih luas. Kementerian dan lembaga lain harus menetapkan dan meresmikan kerangka kerja peningkatan karier untuk penempatan silang, di mana petugas dapat ditempatkan ke Kementerian lain atau di luar negeri selama karier mereka. Misalnya, petugas MINDEF atau DIS dapat melayani penempatan 3 tahun di MCI atau MHA sebagai bagian dari ekosistem info-keahlian atau sebaliknya.

Ketiga, ada kebutuhan untuk mulai menarik bakat ke dalam bidang informasi dari muda melalui pendidikan berkualitas tentang informasi di sekolah dan perguruan tinggi. Karena permintaan dari informasi terus berkembang, pasokan profesional informasi yang terlatih harus cukup untuk memenuhi permintaan ini. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa kursus-kursus berkualitas baik ditawarkan di sekolah-sekolah, politeknik dan universitas-universitas, dan mahasiswa-mahasiswa berkinerja terbaik tertarik untuk mengambil kursus-kursus ini sehingga lulusan yang bergabung dengan Tenaga Kerja Informasi akan berkualitas baik untuk berkontribusi pada industri ini, semakin memperkuat Ekosistem Keahlian Informasi.

Terakhir, Pemerintah juga perlu menarik talenta asing di bidang informasi untuk bekerja di Singapura karena disinformasi adalah pertarungan global. Untuk mempercepat pengembangan kemampuan informasi, Singapura dapat memanfaatkan keahlian siap pakai di pasar SDM asing. Ada kebutuhan untuk paket remunerasi yang menarik, serta kebijakan imigrasi yang sesuai untuk memungkinkan talenta terbaik di bidang informasi untuk bekerja dan tinggal di Singapura. Mereka dapat dengan mudah

berkontribusi pada pertumbuhan Ekosistem Keahlian Informasi, dan juga dapat membantu meningkatkan SDM lokal dengan cepat ke keahlian dan kemampuan yang relevan.

18. **Peningkatan Kesadaran Dan Pendidikan Tentang Disinformasi Untuk Masyarakat Umum**

Selama pandemi Covid-19, ada keterputusan antara seberapa percaya diri orang-orang di Singapura dalam mendeteksi berita palsu dan kemampuan mereka untuk benar-benar melakukannya, menurut temuan dari sebuah penelitian yang dirilis pada Januari 2022. Sekitar setengah dari orang yang disurvei (48% - 53%) mengatakan mereka dapat mengetahui apakah informasi di media sosial itu benar atau salah. Namun, sekitar 69% - 76% mengakui bahwa mereka secara tidak sadar telah membagikan berita palsu, menurut penelitian oleh Pusat Integritas Informasi dan Internet (IN-cube) Universitas Teknologi Nanyang (NTU).⁶⁰ Ini berbahaya karena orang yang percaya diri mungkin akhirnya percaya informasi yang mereka temukan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk menentukan apakah itu benar atau tidak. Oleh karena itu, pendekatan seluruh masyarakat untuk melawan disinformasi adalah dengan memelihara "publik yang terinformasi". Publik yang terinformasi yang sadar akan ancaman disinformasi dan dapat secara kritis mengakses kepercayaan informasi yang diterima akan mempersulit disinformasi untuk mengakar. Langkah pertama untuk ini adalah memiliki kerangka kerja dan program pendidikan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat. Pendidikan dan kesadaran publik harus fokus pada bidang yang luas dari: (1) realitas dan konsekuensi dari berita palsu dan disinformasi, dan (2) pendidikan sosial dan moral.

Dalam hal meningkatkan kesadaran dan pendidikan, Dewan Perpustakaan Nasional Singapura (NLB) program S.U.R.E. (Source, Understand, Research, Evaluate: Sumber, Pahami, Riset, Evaluasi) adalah contoh pendidikan publik yang dapat membantu masyarakat menjadi produsen dan konsumen informasi yang

⁶⁰ The Straits Times. (2022). "Many in Singapore confident they can spot fake news but may not actually be able to: Study", 28 Jan 2022. URL: <https://www.straitstimes.com/tech/tech-news/many-in-singapore-confident-they-can-spot-fake-news-but-may-not-actually-be-able-to-study>

bertanggung jawab melalui konsep kunci Literasi Informasi. Diluncurkan pada tahun 2013, program S.U.R.E. mempromosikan pentingnya pencarian informasi dan penegasan kepada masyarakat umum. Sejak itu, NLB telah memperluas program menjadi S.U.R.E. 2.0 – S.U.R.E untuk Sekolah; S.U.R.E. untuk bekerja; dan S.U.R.E. untuk kehidupan – untuk memenuhi kebutuhan dan segmen populasi yang berbeda.⁶¹ Selain menjangkau sekolah-sekolah di Singapura, program ini juga sejalan dengan berbagai kerangka nasional yang dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan publik tentang ancaman disinformasi.

Selain itu, organisasi seperti Dewan Literasi Media (*Media Literacy Council: MLC*), yang terdiri dari anggota dari masyarakat, sektor swasta, dan publik, mempelopori pendidikan publik tentang literasi media dan kesehatan siber, dan memberi saran kepada pemerintah tentang tanggapan kebijakan yang tepat untuk dunia yang berkembang. media, teknologi, dan partisipasi konsumen. Tujuan utama mereka adalah untuk mengatasi masalah seperti membedakan kebohongan daring dan mendorong pengguna untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam konsumsi media; menampilkan analisis yang lebih besar dan untuk dididik dalam pilihan media; dan waspada terhadap berita palsu dan disinformasi.⁶²

Dalam upaya untuk melawan disinformasi, undang-undang saja tidak cukup dan beberapa negara lebih memilih untuk menerapkan langkah-langkah non-legislatif, yang menanamkan literasi media dan pemikiran kritis. Negara-negara seperti Kanada, Italia, dan Taiwan memperkenalkan kurikulum sekolah yang mengajarkan anak-anak untuk membedakan antara informasi yang salah dan yang kredibel.⁶³ Pemerintah juga telah mulai mempublikasikan informasi yang akurat untuk mengurangi ruang disinformasi yang mengakar, dalam Bahasa Inggris dan berbagai bahasa lainnya di berbagai platform media. Ini termasuk akun WhatsApp resmi pemerintah “gov.sg”, yang tersedia dalam empat bahasa dan memiliki lebih

⁶¹ National Library Board of Singapore. (2022). About SURE campaign. URL: <https://sure.nlb.gov.sg/about-us/sure-campaign/>

⁶² Media Literacy Council. (2022). About Us. URL: <https://www.betterinternet.sg/Who-we-are>

⁶³ Hacıyakupoglu, G., Hui, J. Y., Suguna, V. S., Leong, D., & Rahman, M. F. B. A. (2018). *Countering Fake News: A Survey of Recent Global Initiatives*. S. Rajaratnam School of International Studies. URL: https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/03/PR180416_Countering-Fake-News.pdf

dari 1,2 juta pelanggan. Namun, Pemerintah tidak dapat melakukan ini sendiri, dan partisipasi sektor swasta dan masyarakat harus terintegrasi.

Masih ada ruang untuk perbaikan untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang disinformasi bagi masyarakat umum. **Pertama**, terbatasnya pendidikan dan kesadaran publik tentang dampak dan konsekuensi dari disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan pada aspek sosial, moral, ekonomi dan psikologis masyarakat dan ketahanan dan pertahanan nasional Singapura. Banyak yang tidak mengerti bagaimana sebuah berita palsu yang terkadang "tidak berbahaya" dapat memiliki dampak sosial yang besar. Sikap umum masyarakat di Singapura tetap bahwa jika sepotong informasi dikomunikasikan tanpa niat buruk, maka itu tidak berbahaya. Masyarakat harus lebih waspada terhadap konsekuensi dari disinformasi. Sebagaimana dijelaskan dalam doktrin Lemhannas RI dan Konsep Pertahanan Total Singapura, adalah tanggung jawab negara dan masyarakat untuk menjaga ketahanan ini terhadap segala jenis ancaman. Upaya ini harus dipimpin oleh Pemerintah.

Kedua, perlu ada strategi yang koheren dan holistik untuk menangani pendidikan terkait informasi formal dan informal bagi warga Singapura dari kelompok usia muda, paruh baya, dan usia lanjut. Upaya terkoordinasi dan sistematis, yang selaras dengan strategi atau Kerangka kerja nasional, akan memungkinkan penggunaan sumber daya dan efektivitas yang lebih efisien dalam mendidik dan meningkatkan kesadaran publik tentang disinformasi dan dampaknya terhadap Singapura. Dengan demikian, Kesadaran Informasi (**Info Awareness**) akan terbina secara sistematis di seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan di sekolah, melalui lembaga nasional (Angkatan Bersenjata, perguruan tinggi, serikat pekerja, asosiasi) dan kelompok masyarakat umum harus dilakukan, untuk menciptakan kesadaran holistik dari ancaman disinformasi dan kemampuan informasi terkait untuk melawan ancaman ini.

Ketiga, di samping program pendidikan dan penyadaran, Pemerintah harus mempersiapkan semua warga negara untuk kemungkinan kampanye informasi bermusuhan dan disinformasi yang dapat menyerang kohesi dan kesatuan sosial,

ekonomi, sipil, dan domain psikologis Singapura. Kesiapan Info (*Info Readiness*) Singapura sebagai sebuah negara, akan menentukan kemampuannya untuk menahan segala upaya untuk menabur perselisihan di dalam masyarakat melalui disinformasi. Kesiapan harus diwujudkan melalui latihan kesiapan bagi masyarakat tentang bagaimana tanggapannya terhadap disinformasi di tingkat nasional. Publik yang terinformasi dengan baik adalah publik yang akan diinokulasi dengan baik dari disinformasi. Penggambaran Kesiapan Informasi masyarakat melalui komunikasi publik adalah sinyal yang kredibel kepada orang lain yang merupakan bagian dari strategi pencegahan secara keseluruhan. Hal ini sangat penting untuk Singapura, yang negara kecil, yang tidak memiliki sumber daya alam serta, ekonomi domestik yang besar dan geografi fisik untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dan kelangsungan hidup Singapura.

a. **Solusi Hasil Analisis – Kesadaran dan Kesiapan Informasi (*Info Awareness and Readiness*)**

Berdasarkan analisis di atas, masyarakat yang terinformasi dan memiliki kesadaran yang tinggi akan ancaman disinformasi adalah masyarakat yang sangat siap secara operasional untuk menghadapi ancaman tersebut. Upaya harus diinvestasikan dalam pendidikan di semua segmen masyarakat untuk meningkatkan Kesadaran dan Kesiapan Informasi untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh yang dapat mendeteksi dan memahami apa yang salah. Kesiapan Info juga mencerminkan kesiapan masyarakat untuk melawan ancaman disinformasi yang mengancam cara hidup kita, yang berkontribusi pada pertahanan psikologis Singapura.

Untuk menginokulasi masyarakat terhadap ancaman disinformasi dan tahan terhadap berita palsu dan kampanye informasi yang tidak bersahabat, fokus utamanya adalah membangun dan mengembangkan program pendidikan dan kesadaran publik yang diperlukan untuk memperkuat literasi digital dan media. Hal ini karena kesadaran dan pendidikan sangat penting untuk memperkuat fondasi masyarakat dan membangun masyarakat yang tangguh dan mampu mengambil dan memahami apa itu berita palsu. Proses

pendidikan tidak boleh berakhir ketika pendidikan sekolah formal selesai tetapi terus menjadi proses belajar sepanjang hayat.

Pertama, program pendidikan literasi media berbasis sekolah harus fokus pada populasi yang akan bersekolah, yang mencakup populasi siswa di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Mulai dari usia muda, program ini harus menjelaskan prevalensi berita palsu dan disinformasi yang terjadi di seluruh dunia. Kurikulum pendidikan harus mencakup bahaya berita palsu dan bagaimana hal itu dapat mengikis pertahanan psikologis dan kohesi sosial Singapura. Termasuk dalam kurikulum, itu juga dapat menjadi platform untuk mendidik dan memperbarui populasi siswa, secara sederhana, undang-undang saat ini dan baru yang mengatur berita palsu dan disinformasi. Ini akan mencakup klarifikasi tentang definisi apa yang didefinisikan sebagai berita palsu atau sebaliknya. Program ini juga harus menjadi kesempatan yang baik untuk melibatkan mahasiswa menjadi advokat sukarela di dunia maya. Saat ini, populasi siswa sangat ingin tahu, dan Pemerintah perlu menarik perhatian mereka, oleh karena itu program berbasis sekolah ini penting dan harus direvisi, dan dilaksanakan dengan hati-hati.

Kedua, program pendidikan publik harus fokus terutama mereka yang tidak lagi dalam sistem pendidikan formal dan lebih rentan di masyarakat, seperti orang yang tua. Sementara program pendidikan literasi media berbasis sekolah akan memberikan hasil yang bagus dengan populasi siswa jika diterapkan dengan benar, banyak orang Singapura sudah bekerja dan berada di luar usia sekolah. Segmen masyarakat ini perlu dididik tentang ancaman disinformasi karena mereka adalah pengguna berat internet dan kemungkinan besar juga paling rentan terhadap disinformasi. Pertama, kursus kesadaran publik harus dilakukan melalui pusat komunitas di mana aksesibilitas tidak akan menjadi masalah. Pusat komunitas di Singapura adalah fasilitas yang berlokasi strategis di berbagai pinggiran kota di Singapura yang bertujuan untuk terhubung dengan penduduk. Dengan

bantuan Paguyuban Rakyat (**People's Association: PA**), mereka secara rutin mengadakan kursus-kursus minat warga dan membina interaksi bertetangga antar warga untuk mempererat kohesi. Ini adalah platform yang berguna untuk menyebarkan informasi tentang disinformasi dan memerangi berita palsu. Konten harus selaras dengan yang dibahas dalam program berbasis sekolah dan dilakukan dalam bahasa daerah karena orang yang tua mungkin tidak fasih berbahasa Inggris. Selain itu, Kesadaran Informasi juga dapat diperkuat dengan menggunakan berbagai platform media tradisional dan baru untuk mengkomunikasikan dampak disinformasi dan berita palsu. Terakhir, untuk memberikan kredibilitas pada keseriusan disinformasi, Kepemimpinan Singapura harus memiliki komunikasi yang teratur tentang masalah ini. Di Singapura, kepercayaan terhadap Lembaga Nasional dan para Pemimpinnya tinggi, sehingga Pemerintah harus memanfaatkan posisi kekuatan ini untuk berkomunikasi dengan masyarakat karena masyarakat cenderung mendengarkan ketika para Pemimpin Nasional berkomunikasi. Namun, hal ini harus dilakukan secara sensitif agar tidak terkesan sebagai propaganda Pemerintah.

Ketiga, dengan masyarakat yang diinokulasi terhadap disinformasi dengan kesadaran dan kesiapan Informasi yang tinggi, ini akan melengkapi upaya untuk membangun ekosistem pengecekan fakta yang kuat seperti yang disebutkan sebelumnya karena masyarakat yang terinformasi dengan baik akan berkontribusi pada ekosistem pengecekan fakta berkualitas tinggi dan melawan disinformasi bersama. Peran masyarakat sipil dan masyarakat Singapura penting dalam memerangi disinformasi. Seperti *Lithuanian Elves*, warga Singapura yang terinformasi dengan baik dan diinokulasi dapat menjadi tentara warga di dunia maya jika mereka memahami tujuan dan makna dalam memerangi disinformasi yang berdampak pada Ketahanan Nasional Singapura.

Tepat disebut sebagai *Singaporean Elves*, ini bisa menjadi orang-orang yang dapat "dimobilisasi" yang berkomitmen untuk menyelidiki berita

yang mencurigakan, dan mengekspos mereka jika mereka ditemukan sebagai berita palsu atas dasar sukarela murni. Upaya akar rumput ini akan secara signifikan meningkatkan kemampuan informasi untuk melacak berita palsu, dan mengeksposnya. Ini akan membentuk Singapura komunitas pemeriksa fakta sukarelawan. *Singaporean Elves* sangat penting dalam perang melawan berita palsu dan disinformasi, dan mereka hanya dapat dikembangkan dan didorong untuk memainkan peran mereka jika ada keterlibatan reguler oleh lembaga nasional. Ketika seluruh masyarakat digalakkan dan diinokulasi terhadap disinformasi, beban untuk melindungi Singapura dari disinformasi akan menjadi tanggung jawab bersama di seluruh negeri, dan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ini akan memanfaatkan sumber daya di seluruh negeri dan meningkatkan kemampuan informasi dan memperkuat ketahanan nasional. Keterlibatan masyarakat juga akan menghasilkan manfaat langsung bagi pertahanan psikologis dan sosial, karena masyarakat akan menyadari tujuan dalam peran mereka dalam melindungi negara dari disinformasi.

19. **Optimalisasi Kerja Sama Antar Para Pemangku Kepentingan Dalam Penggunaan Dan Keamanan Informasi**

Undang-undang dan pendidikan tidak cukup dalam melawan berita palsu dan disinformasi karena ancaman ini lintas batas. Langkah-langkah pencegahan yang dilakukan secara kolaboratif dan kooperatif harus diambil. Kolaborasi dan kerja sama untuk memerangi berita palsu tersebut dapat berupa: (1) keterlibatan regional dan internasional; (2) upaya kolaboratif non-pemerintah; dan (3) kemitraan pemerintah-industri. Disinformasi dapat dilawan melalui upaya bersama di forum regional dan internasional untuk berbagi pengalaman dan berkolaborasi di bidang yang dapat diterima bersama. Entitas yang bekerja sama harus menyetujui aturan perikatan, tindakan yang harus diambil dalam jangka waktu tertentu, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Selama kolaborasi, aturan keterlibatan harus direvisi sebagai tanggapan terhadap lingkungan informasi yang dinamis dan ditinjau sesuai dengan hasil kebijakan yang diterapkan.

Pertama, secara regional untuk Negara Anggota ASEAN (*ASEAN Member States: AMS*), pertemuan meja bundar pada September 2017 oleh Para Menteri ASEAN yang Bertanggung Jawab atas Informasi (*ASEAN Ministers Responsible for Information: AMRI*) telah menetapkan panggung untuk kolaborasi regional untuk mempromosikan upaya nyata untuk memfasilitasi penelitian bersama dalam fenomena berita palsu dalam rangka mengembangkan tindakan pencegahan yang efektif terhadap mereka. Pada Mei 2018, AMRI juga mengeluarkan deklarasi tentang kerangka kerja untuk meminimalkan efek berbahaya dari berita palsu dan disinformasi.⁶⁴ AMS juga telah sepakat untuk bekerja sama untuk meningkatkan literasi digital, mengembangkan pedoman untuk melindungi dari berita palsu dan; untuk berbagi praktik terbaik. Selain kerja sama regional, Singapura juga harus membangun dan memperkuat kerja sama dengan mitra internasional yang berpikiran sama, seperti Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab (*DFRLab*), Lithuanian Elves⁶⁵ and the NATO StratCom Center of Excellence (*NATO StratCom COE*), di mana ini badan-badan internasional memiliki pengalaman operasional dalam melawan disinformasi dari musuh nyata. Hambatan utama bagi kerja sama regional dan internasional adalah bahwa negara-negara biasanya khawatir untuk mengungkapkan kerentanan mereka karena masalah keamanan operasional. Berdasarkan teori Diplomasi Negara Kecil, Singapura perlu mengoptimalkan penggunaan kebijakan luar negeri yang efektif untuk memperkuat eksistensi globalnya. Singapura harus memulai upaya **Diplomasi Info** untuk memperluas kerja sama dan upaya kolaborasi dengan mitra regional dan internasional di bidang ini. Kurangnya kerja sama nasional dan internasional, termasuk Singapura dan negara-negara lain, saat ini membatasi pencegahan disinformasi.

Kedua, Pemerintah Singapura harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan perusahaan teknologi, seperti Google dan Meta, untuk memerangi disinformasi. Upaya ini harus seimbang antara kebutuhan Pemerintah dan industri

⁶⁴ ASEAN Joint Media Statement. (2018). "14th Conference of the ASEAN Ministers Responsible for Information", 10 May 2018. URL: <https://asean.org/wp-content/uploads/2018/05/14th-AMRI-JMS-FINAL.pdf>, 10 May 2018.

⁶⁵ Dibentuk pada tahun 2014, Lithuanian Elves adalah masyarakat sipil dan kelompok akar rumput yang berbasis di Lituania yang terdiri dari sekitar 5.000 sukarelawan yang berjuang melawan disinformasi dan propaganda Rusia di Lituania. Para relawan ini menyatukan para profesional dari berbagai bidang: politik luar negeri, keamanan siber, TI, ekonomi, perlindungan lingkungan, dan lainnya.

karena keamanan data dan penangkalan berita palsu selalu bertolak belakang. Ini karena segala upaya untuk menuntut perusahaan teknologi untuk menyediakan akses ke data pelanggan melalui undang-undang akan dipandang negatif. Ini mungkin menghalangi perusahaan teknologi untuk mendirikan anak perusahaan di Singapura dan bekerja sama dengan Pemerintah dalam upaya Singapura untuk memerangi disinformasi. Pemerintah perlu terlibat dengan perusahaan teknologi untuk menentukan cara terbaik untuk meningkatkan kolaborasi dan meminimalkan perselisihan. Misalnya, semua pemangku kepentingan dapat bekerja untuk membangun ekosistem pengecekan fakta yang kuat. Karena pemeriksaan fakta berkualitas tinggi membutuhkan banyak sumber daya dan menantang pemeriksa fakta untuk bekerja sendiri, kolaborasi antara Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan menjadi penting. Perusahaan teknologi juga dapat didorong untuk memainkan peran mereka dengan bekerja sama dengan pemeriksa fakta independen untuk meninjau konten di platform daring mereka. Misalnya, Malaysia juga telah memperkenalkan situs verifikasi informasi (Sebenarnya.my) untuk melawan berita palsu.⁶⁶ Dengan kerja sama dan kolaborasi yang kuat dan optimal antara berbagai pemangku kepentingan, ekosistem pengecekan fakta yang kuat dan besar dapat dikembangkan dan dioperasikan untuk memerangi disinformasi.

a. **Solusi Hasil Analisis – Diplomasi Informasi (*Info Diplomacy*).**

Berdasarkan analisis di atas, Singapura harus membangun kerja sama dan kolaborasi dengan mitra regional dan internasional yang berpikiran sama dalam pengembangan kemampuan informasi untuk mengatasi disinformasi. Untuk tetap relevan dan menjadi kontributor yang berguna di panggung global, Singapura harus bekerja sama secara proaktif, regional dan global, dalam kode etik, pengembangan teknologi, serta pengaturan standar internasional dalam domain informasi. Bentuk Diplomasi Info ini menyediakan alat untuk memungkinkan Singapura sebagai negara kecil untuk memperluas ruang kebijakannya di panggung global. Ini menjadi

⁶⁶ New Straits Times. (2017). "Communications Ministry launches sebenarnya.my to quash fake news, information", 14 Mar 2017. URL: <https://www.nst.com.my/news/2017/03/220604/communications-ministry-launches-sebenarnyamy-quash-fakenews-information>

platform bagi negara-negara kecil lainnya yang menghadapi ancaman disinformasi serupa. Diplomasi info memungkinkan Singapura memainkan peran penting secara regional dan global, di luar kerangka AMRI. Hal ini mengangkat Singapura dalam hal posisi globalnya di bidang informasi, dan juga memperkuat ketahanan Singapura dalam menghadapi potensi ancaman disinformasi.

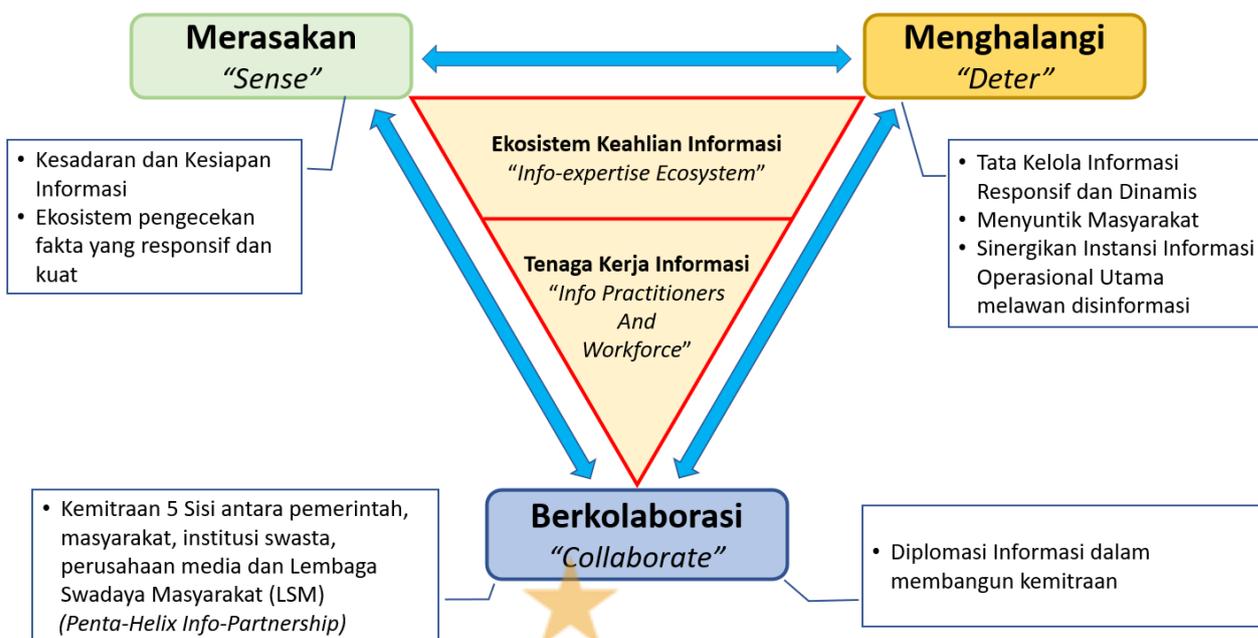
Disinformasi dan berita palsu tidak lagi terbatas pada isu-isu nasional karena melampaui batas dan telah menjadi tinggi di arena internasional. Faktanya, sebagian besar, jika tidak semua negara dihadapkan pada ancaman disinformasi yang mengikis ketahanan dan kepercayaan masyarakat mereka terhadap lembaga pemerintah. Oleh karena itu, perlu terjalin kerja sama dan kolaborasi yang mendalam melalui Diplomasi Info dan berbagai kemitraan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Hal ini untuk (1) memfasilitasi pertukaran keterampilan dan pengetahuan; (2) menjembatani kesenjangan antara semua pemangku kepentingan yang melawan disinformasi; (3) membantu mengidentifikasi isu dan konteks yang berbeda dengan masalah yang tumpang tindih; dan (4) memungkinkan transmisi narasi yang konsisten. Tindakan dan solusi kolaboratif yang ditujukan untuk mencegah penyebaran berita palsu akan memfasilitasi respons yang cepat dan lebih efektif, dan akan memberikan hasil yang lebih baik daripada upaya terisolasi yang kurang fokus.

Pertama, di tingkat regional, Singapura harus terus melobi AMRI untuk menetapkan dan meresmikan Kode Etik dan Praktik Informasi untuk mencegah penyebaran berita palsu dan disinformasi antar Negara Anggota. Singapura harus berbagi dan mendidik Negara-negara Anggota tentang berbagai studi kasus POFMA dan FICA sehingga Negara-negara Anggota dapat mengeksplorasi undang-undang mereka sendiri untuk memerangi disinformasi. Dengan membangun dan memperkuat respons regional terhadap disinformasi, dampak negatif dan potensi disinformasi dan berita palsu dapat dimitigasi di tingkat regional.

Kedua, Singapura harus terus membangun dan meresmikan kemitraan dengan mitra regional dan internasional melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding: MOU*). Misalnya, Nota Kesepahaman dapat ditandatangani antara mitra regional dan internasional seperti Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab (*DFRLab*) untuk memungkinkan kerja sama bilateral yang lebih dalam dalam melawan disinformasi. Dengan kolaborasi yang lebih dalam, pemangku kepentingan seperti MCI dan MINDEF dapat mengirim petugas mereka ke lembaga internasional ini dalam program pertukaran untuk mendapatkan pengalaman operasional, belajar dari praktik terbaik mereka dan juga untuk peluang perbandingan. Nota Kesepahaman ini juga harus memungkinkan adanya pertukaran informasi intelijen untuk peringatan dini, dan penyelidikan serta penuntutan terhadap pelaku berita palsu dan disinformasi di luar negeri sehingga undang-undang yang telah diterapkan efektif. Oleh karena itu, Diplomasi Informasi memungkinkan Singapura untuk secara proaktif melibatkan para pemangku kepentingan regional dan internasional dalam meningkatkan kemampuan informasi, dan mengembangkan solusi melalui pengembangan yang gesit untuk masyarakat yang lebih tangguh terhadap disinformasi.

20. **Mengadopsi Kerangka Kerja “Merasakan, Menghalangi, Berkolaborasi”**: (*Sense, Deter, Collaborate*)

Untuk mencapai ketahanan dan penciptaan masyarakat yang mampu menangani ancaman disinformasi, solusi-solusi yang ditawarkan di atas harus mempertimbangkan inklusivitas, keberlanjutan, kesejahteraan warga negara, transparansi, akuntabilitas, keadilan, ketahanan, keamanan dan keselamatan. Solusi tersebut dapat disinkronkan menjadi sebuah strategi untuk meningkatkan kemampuan informasi untuk memperkuat Ketahanan Nasional Singapura terhadap disinformasi, dan akan mengadopsi kerangka kerja “Merasakan, Menghalangi, Berkolaborasi” (*Sense, Deter, Collaborate*). (Lihat Gambar 3).



Gambar 3: Strategi Jangka Panjang – "Merasakan, Menghalangi, Berkolaborasi"

Secara umum, strategi "**Merasakan**" adalah membangun aspek-aspek yang diperlukan untuk mendeteksi berita palsu dan disinformasi yang dapat mematahkan kohesi sosial dan Pertahanan psikologis Singapura. Strategi untuk "**Menghalangi**" adalah memastikan undang-undang responsif dan relevan untuk penegakan yang efektif, sehingga dapat melindungi negara dari berita palsu dan disinformasi. Ini juga mencakup program pendidikan dan kesadaran publik yang diperlukan untuk memelihara masyarakat yang terinformasi dengan baik, sehingga dapat membangun masyarakat yang diinokulasi dan tahan terhadap berita palsu dan disinformasi. Strategi untuk "**Berkolaborasi**" adalah dengan memanfaatkan dan membangun info-ekosistem yang lebih luas yang terdiri dari kemitraan regional dan internasional. Inti dari 3 strategi tersebut adalah kebutuhan untuk memiliki Ekosistem Keahlian Informasi yang kuat, didukung Tenaga Kerja Informasi yang terlatih dan kompeten.

Ketiga fokus strategis ini tidak saling eksklusif, namun terkadang tumpang tindih dan saling terkait untuk menghasilkan potensi maksimal dalam mengembangkan kemampuan informasi untuk melawan disinformasi. Ini adalah Langkah-langkah dan inisiatif strategis dalam meningkatkan kemampuan informasi Singapura untuk memperkuat Pertahanan dan Ketahanan Nasional Singapura.

Oleh karena itu, apabila diterapkan secara holistik dan komprehensif, langkah-langkah strategis tersebut di atas mengikuti kerangka “Merasakan, Menghalangi, Berkolaborasi” (***Sense, Deter, Collaborate***), dan akan mencapai strategi untuk meningkatkan kemampuan informasi untuk memperkuat Ketahanan Nasional Singapura terhadap disinformasi.



BAB IV PENUTUP

21. Simpulan

Dalam mengoptimalkan peraturan perundang-undangan dan perangkat hukum untuk mendukung penguatan dan pengembangan kemampuan informasi, diperlukan **Tata Kelola Info yang Responsif dan Dinamis**. Oleh karena itu, model ini diusulkan dalam taskap ini untuk memfasilitasi siklus umpan balik yang responsif antara Pemerintah, perusahaan, dan warga negara, untuk membentuk persatuan nasional yang lebih kuat dan kepercayaan yang lebih besar serta memungkinkan pembuatan kebijakan yang responsif oleh Pemerintah. Analisis terhadap struktur, organisasi, dan institusi yang ada menyimpulkan bahwa lingkungan yang lebih kolaboratif di antara semua pemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat semua aspek masyarakat untuk melawan disinformasi.

Pembentukan **Kemitraan Penta-Helix Info** yang baru antara Pemerintah, komunitas, lembaga swasta, perusahaan media, dan LSM akan memungkinkan keterlibatan rutin dengan para pemangku kepentingan ini untuk membangun kepercayaan menyempurnakan kebijakan, memperkuat pertukaran informasi, strategi, dan pengetahuan teknis untuk melawan disinformasi. Sehingga optimalisasi instansi operasional utama yang telah dibentuk untuk berkontribusi pada pengembangan kemampuan informasi yang optimal dapat tercapai.

Selain membangun struktur dan organisasi yang diperlukan, harus ada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara bersamaan di bidang informasi serta untuk memperkuat Ketahanan Nasional Singapura terhadap disinformasi adalah kebutuhan untuk memiliki **Ekosistem Keahlian Informasi** yang kuat, yang memungkinkan oleh **Praktisi Info terlatih dan Tenaga Kerja Informasi**. Model baru Ekosistem Keahlian Informasi, dan Praktisi Info dan Tenaga Kerja Informasi yang terlatih akan memastikan ketahanan ekonomi warga Singapura di lingkungan yang kompleks saat ini. Taskap ini juga mengidentifikasi kebutuhan untuk membangun dan mengembangkan program pendidikan dan kesadaran publik yang diperlukan untuk memperkuat literasi digital dan media untuk menginokulasi

masyarakat terhadap ancaman disinformasi dan tahan terhadap berita palsu dan kampanye informasi bermusuhan. Masyarakat yang terinokulasi, dengan **Kesadaran dan Kesiapan Informasi** yang meningkat akan lebih tahan terhadap ancaman disinformasi.

Optimalisasi Kerja Sama Antar Para Pemangku Kepentingan Dalam Penggunaan Dan Keamanan Informasi berupa kemitraan regional dan internasional mendalam melalui **Diplomasi Informasi** perlu dibentuk oleh Singapura. Melalui kemitraan ini, diharapkan Singapura dapat secara proaktif melibatkan pemangku kepentingan regional dan global serta mengembangkan solusi kolaboratif melawan disinformasi karena akan memberikan hasil yang lebih baik daripada upaya terisolasi yang kurang fokus.

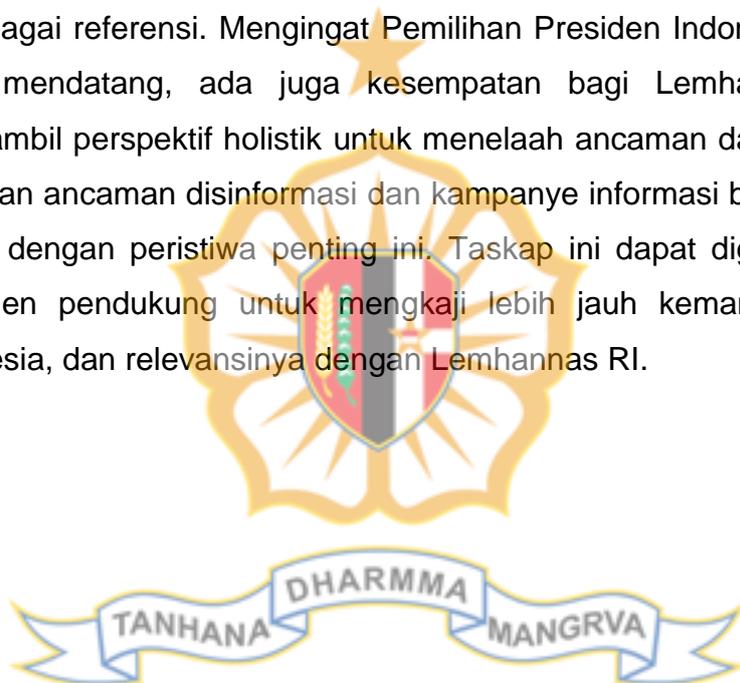
22. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi diajukan sebagai tindak lanjut dari taskap ini:

- a. Direkomendasikan agar Pemerintah Singapura membentuk Satuan Tugas Respons Informasi Nasional (*National Information Response Task Force*) untuk melawan berita palsu dan disinformasi. Ini akan dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura (MCI), dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri (MHA) dan Kementerian Pertahanan Singapura (MINDEF). MCI juga diusulkan untuk mengadopsi kerangka kerja “Merasakan, Menghalangi, Berkolaborasi” untuk memandu diskusi tentang pengembangan operasional dan kemampuan dengan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- b. Direkomendasikan Kementerian Pendidikan (MOE), bersama MCI, mengembangkan strategi pendidikan untuk meningkatkan literasi digital dan media bagi sekolah di semua tingkatan untuk memperkuat Kesadaran dan Kesiapan Informasi. MCI juga diusulkan untuk memimpin upaya pendidikan bagi masyarakat lainnya.

c. Direkomendasikan agar Kementerian Tenaga Kerja (MOM), bersama MCI, MHA, MINDEF dan instansi lainnya, menyusun strategi dan roadmap peningkatan kualitas SDM di bidang informasi. Ini akan mencakup paket gaji dan renumerasi yang menarik dan menetapkan jabatan yang tinggi dan penting dalam pekerjaan yang berhubungan dengan informasi. MOM dan MHA harus bekerja sama untuk melihat kembali kebijakan imigrasi sehingga talenta asing di bidang informasi dapat tertarik untuk bekerja di Singapura.

d. Dengan transformasi digital menjadi salah satu area fokus utama Lemhannas RI, temuan dalam taskap ini dapat bermanfaat bagi Lemhannas RI sebagai referensi. Mengingat Pemilihan Presiden Indonesia pada tahun 2024 mendatang, ada juga kesempatan bagi Lemhannas RI untuk mengambil perspektif holistik untuk menelaah ancaman dan peluang untuk melawan ancaman disinformasi dan kampanye informasi bermusuhan yang terkait dengan peristiwa penting ini. Taskap ini dapat digunakan sebagai dokumen pendukung untuk mengkaji lebih jauh kemampuan informasi Indonesia, dan relevansinya dengan Lemhannas RI.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi

1. ASEAN Joint Media Statement. (2018). "14th Conference of the ASEAN Ministers Responsible for Information", 10 May 2018. URL: <https://asean.org/wp-content/uploads/2018/05/14th-AMRI-JMS-FINAL.pdf>, 10 May 2018.
2. Bloomberg News. (2019). "Singapore's Fake News Bill Set to Become Law in Second Half of Year", 15 Apr 2019. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-15/singapore-s-fake-news-bill-to-take-effect-in-second-half-of-2019#xj4y7vzkg>
3. Business Times. (1984). "[Driving home message of Total Defence](#)", 3 April 1984. URL: <https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/biztimes19840403-1.2.11.11>
4. Channel NewsAsia. (2019). "Ministers Issuing Directives, with Scope for Judicial Oversight, Strikes Best Balance in Combating Fake News: Iswaran", *ChannelNewsAsia*, 8 May 2019. URL: <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/ministers-given-authority-issue-directives-fake-newspofma-bill-11514544>.
5. Channel NewsAsia. (2021). "Ministers to address 'false allegations' that FTAs allow foreigners 'free hand' to live and work in Singapore", 1 Jul 2021. URL: <https://www.channelnewsasia.com/singapore/singapore-fta-ministerial-statements-parliament-ceca-psp-2001511>
6. Channel NewsAsia. (2022). "Attitudes shifting on 377A but Singapore Government cannot ignore views of 'middle ground': Shanmugam", 29 Jun 2022. URL: <https://www.channelnewsasia.com/singapore/attitudes-377a-shifting->

singapore-cannot-ignore-views-middle-ground-shanmugam-bbc-interview-2780991

7. Channel NewsAsia. (2022). "NDR 2022: Singapore to repeal Section 377A, amend Constitution to protect definition of marriage", 21 Aug 2022. URL: <https://www.channelnewsasia.com/singapore/section-377a-repeal-law-sex-gay-men-marriage-constitution-pm-lee-ndr2022-2891381>

8. Channel NewsAsia. (2022). "Army, Air Force, Navy and soon, digital and intelligence: SAF to launch 4th service to deal with new threats", 2 Mar 2022. URL: <https://www.channelnewsasia.com/singapore/saf-digital-intelligence-fourth-service-ng-eng-hen-2532456>

9. Cheong, D. D., Neubronner, S., & Ramakrishna, K. (2020). *Foreign Interference in Domestic Politics: A National Security Perspective*. S. Rajaratnam School of International Studies. URL: https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2020/04/PR200409_Foreign-Interference-in-Domestic-Politics.pdf

10. Chua, R. (2021). Looking Beyond POFMA to Combat Fake News and Misinformation in Singapore. *Singapore Policy Journal*. URL: <https://spj.hkspublications.org/2021/10/24/looking-beyond-pofma-to-combat-fake-news-and-misinformation-in-singapore/>

11. Constitution of the Republic of Singapore. (1965). URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/CONS1963>.

12. Constitution of the Republic of Singapore, Part 4, Article 12. (1965). URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/CONS1963?ProvIds=P14-#pr12->

13. Consumer Insights. (2015). *Attention Spans*. URL: <https://dl.motamem.org/microsoft-attention-spans-research-report.pdf>

14. Cyber Security Agency of Singapore (CSA). Cybersecurity Act. URL: <https://www.csa.gov.sg/legislation/cybersecurity-act>

15. Daud, M. (2020). Fake News in The Malaysian 14th General Election: Shall the Net Be Free Forever? *IJUM Law Journal*, 28(S1)), 303-324. DOI: [https://doi.org/10.31436/iiumlj.v28i\(S1\).587](https://doi.org/10.31436/iiumlj.v28i(S1).587)
16. Department of Statistics, Singapore. 2021. URL: <https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/publications/cop2020/sr1/findings.pdf>
17. Digital 2022: Another Year of Bumper Growth. *We are Social*. URL: <https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/>
18. Dookeran, W., & Mohan, P.S. (2019). Small state diplomacy and global competitiveness. *Small States & Territories*, 2(1), 69-82. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/224978894.pdf>
19. Edelman. (2022). 2022 Edelman Trust Barometer. URL: <https://www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer>
20. Hacıyakupoglu, G., Hui, J. Y., Suguna, V. S., Leong, D., & Rahman, M. F. B. A. (2018). *Countering Fake News: A Survey of Recent Global Initiatives*. S. Rajaratnam School of International Studies. URL: https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/03/PR180416_Countering-Fake-News.pdf
21. Hassain, J. (2022). *Disinformation in Democracies: Improving Societal Resilience to Disinformation*. NATO StratCom Centre of Excellence. URL: <https://stratcomcoe.org/publications/disinformation-in-democracies-improving-societal-resilience-to-disinformation/241>
22. Infocomm Media Development Authority (IMDA). (2022). About IMDA. URL: <https://www.imda.gov.sg/Who-We-Are/about-imda>

23. Ipsos. (2018). The Susceptibility of Singaporeans Towards Fake News, 28 Sep 2018. URL: <https://www.ipsos.com/en-sg/susceptibility-singaporeans-towards-fake-news>
24. Jayakumar, S., Ang, B., & Anwar, N. D. (2021). Fake News and disinformation: Singapore perspectives. In *Disinformation and Fake News* (pp. 137-158). Palgrave Macmillan, Singapore.
25. Jeppesen, S., Hoechsmann, M., VanDyke, D., & McKee, M. (2022). *The Capitol Riots: Digital Media, Disinformation, and Democracy Under Attack*. Routledge. URL: <https://www.routledge.com/The-Capitol-Riots-Digital-Media-Disinformation-and-Democracy-Under-Attack/Jeppesen-Hoechsmann-ulthiin-VanDyke-McKee/p/book/9781032160405>
26. Levinson, P. (2017). *Fake News in Real Context*. Connected Editions, Incorporated.
27. Lewandowsky, S., & Van Der Linden, S. (2021). Countering Misinformation and Fake News through Inoculation and Prebunking. *European Review of Social Psychology*, 32(2), 348-384.
28. Lim, R. (2020). *Disinformation as a Global Problem – Regional Perspectives*. NATO StratCom Centre of Excellence. URL: <https://stratcomcoe.org/publications/disinformation-as-a-global-problem-regional-perspectives/61>
29. Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370-96
30. Media Literacy Council. (2022). About Us. URL: <https://www.betterinternet.sg/Who-we-are>

31. Ministry of Communications and Information (MCI). (2022). Our Organisation. URL: <https://www.mci.gov.sg/about-us>
32. MINDEF News Release. (15 Feb 2019). *Total Defence Strengthened with Addition of Digital Defence as the Sixth Pillar*. Retrieved 10 Jul 22 from https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/news-and-events/latest-releases/article-detail/2019/February/15feb19_nr
33. Ministry of Home Affairs. "HIC Provisions of the Foreign Interference (Countermeasures) Act to Take Effect from 7 July 2022", 6 Jul 2022. URL: <https://www.mha.gov.sg/mediaroom/press-releases/hic-provisions-of-the-foreign-interference-countermeasures-act-to-take-effect-from-7-july-2022/>
34. National Library Board. (2016). *Total Defence*. URL: https://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_572_2004-12-23.html
35. National Library Board. (2022). Shared Values are Adopted. *HistorySG*. URL: [https://eresources.nlb.gov.sg/history/events/62f98f76-d54d-415d-93a1-4561c776ab97#:~:text=The%20five%20Shared%20Values%20that,5\)%20Racial%20and%20religious%20harmony.](https://eresources.nlb.gov.sg/history/events/62f98f76-d54d-415d-93a1-4561c776ab97#:~:text=The%20five%20Shared%20Values%20that,5)%20Racial%20and%20religious%20harmony.)
36. National Library Board of Singapore. (2022). About SURE campaign. URL: <https://sure.nlb.gov.sg/about-us/sure-campaign/>
37. Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic governance: Embedding culture, capabilities and change in Singapore (English version)*. World Scientific.
38. Neubronner, S. (2017). Social Media and "Fake News": Impact on Social Cohesion in Singapore. *S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS)*, 43. URL: <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/03/CO17043.pdf>
39. New Straits Times. (2017). "Communications Ministry launches *sebenarnya.my* to quash fake news, information", 14 Mar 2017. URL:

<https://www.nst.com.my/news/2017/03/220604/communications-ministry-launches-sebenarnyamy-quash-fakenews-information>

40. OCHA. (2022). Global Terrorism Index 2022, 2 Mar 2022. URL: <https://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2022>

41. Ong, J.C. & Tapsell, R. (2020). *Mitigating Disinformation in Southeast Asian Elections: Lessons from Indonesia, Philippines and Thailand*. NATO StratCom Centre of Excellence. URL: <https://stratcomcoe.org/publications/mitigating-disinformation-in-southeast-asian-elections/47>

42. Public Service Division. (2015). Establishing Our Place in the World. URL: <https://www.psd.gov.sg/heartofpublicservice/our-institutions/establishing-our-place-in-the-world/>

43. Quirós, C. T. (2021). Strategic communications as a key factor in countering hybrid threats. *European Parliamentary Research Service, Scientific Foresight Unit (STOA)*. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656323/EPRS_STU\(2021\)656323_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656323/EPRS_STU(2021)656323_EN.pdf)

44. Reitano, T., & Trabulsi, A. (2016). Virtually Illicit: The Use of Social Media in a Hyper-Connected World. *Beyond Convergence: World Without Order, Center for Complex Operations*, (Washington DC: National Defence University, 2016), 215-233.

45. Roozenbeek, J. & Van Der Linden, S. (2021). *Inoculation Theory and Misinformation*. NATO StratCom Centre of Excellence. URL: <https://stratcomcoe.org/publications/inoculation-theory-and-misinformation/217>

46. Sarts, J. (2021). Disinformation as a threat to national security. In *Disinformation and Fake News* (pp. 23-33). Palgrave Macmillan, Singapore.

47. Singapore Statutes Online. "Cybersecurity Act 2018", 7 Aug 22. URL: https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/9-2018/Published/20211231?DocDate=20180312&ViewType=Pdf&_=20220422184321
48. Singapore Statutes Online. "Foreign Interference (Countermeasures) Act (FICA) 2021", 7 Aug 2022. URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/FICA2021>
49. Singapore Statutes Online. "Info-communications Media Development Authority Act 2016", 7 Aug 22. URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/IMDAA2016>
50. Singapore Statutes Online. "Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act 2019", 7 Aug 2022. URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/POFMA2019>
51. Singapore Statutes Online. "Telecommunications Act 1999", 7 Aug 22. URL: <https://sso.agc.gov.sg/Act/TA1999>
52. Steinberg, L. (2017). "Infographic: Beyond Fake News – 10 Types of Misleading News," *European Association for Viewers Interest (EAVI)*. URL: <https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info/>
53. Tapsell, R. (2021). Disinformation and Cultural Practice in Southeast Asia. In *Disinformation and Fake News* (pp. 91-101). Palgrave Macmillan, Singapore.
54. The Straits Times. (2016). "Prima Deli apologises, sacks staff for making racist remarks to job interviewee", 29 Apr 2016. URL: <https://www.straitstimes.com/singapore/manpower/primadeli-apologises-sacks-staff-for-making-racist-remarks-to-job-interviewee>
55. The Straits Times. (2017). "Fake Facebook accounts created in the names of at least 13 PAP MPs", 17 Mar 2017. URL: <https://www.straitstimes.com/singapore/online-scammers-impersonating-mps-using-fake-facebook-accounts>

56. The Straits Times, "Facebook and Google move to Tackle Fake News", 8 Apr 2017.
57. The Straits Times. "Some spreading fake news about foreign worker dorms to incite violence: Shanmugam", 29 April 2020. URL: <https://www.straitstimes.com/singapore/some-people-spreading-fake-news-about-foreign-worker-dorms-to-incite-violence-shanmugam>
58. The Straits Times. (2021). "Singapore's fake news law used 33 times to date, including 19 against Covid-19 misinformation", 1 Dec 2021. URL: <https://www.straitstimes.com/tech/tech-news/singapores-fake-news-law-used-33-times-to-date-including-19-times-against-covid-19>
59. The Straits Times. (2022). "Many in Singapore confident they can spot fake news but may not actually be able to: Study", 28 Jan 2022. URL: <https://www.straitstimes.com/tech/tech-news/many-in-singapore-confident-they-can-spot-fake-news-but-may-not-actually-be-able-to-study>
60. Toh, B. K. (2016). *Singapore's Development and Use of Military Power: Diplomacy, Deterrence, Compellence and Counter-coercion*. DOI: 10.13140/RG.2.1.4447.7524
61. Vadaketh, S. T., & Low, D. (2014). *Hard choices: Challenging the Singapore consensus*. NUS Press.
62. Vasu, N., Ang, B., Teo, T. A., Jayakumar, S., Raizal, M., & Ahuja, J. (2018). *Fake news: National Security in the Post-Truth Era*. S. Rajaratnam School of International Studies. URL: https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/01/PR180313_Fake-News_WEB.pdf
63. Vilmer, J. B. J. (2018). *Information Manipulation: A Challenge for Our Democracies*. URL:

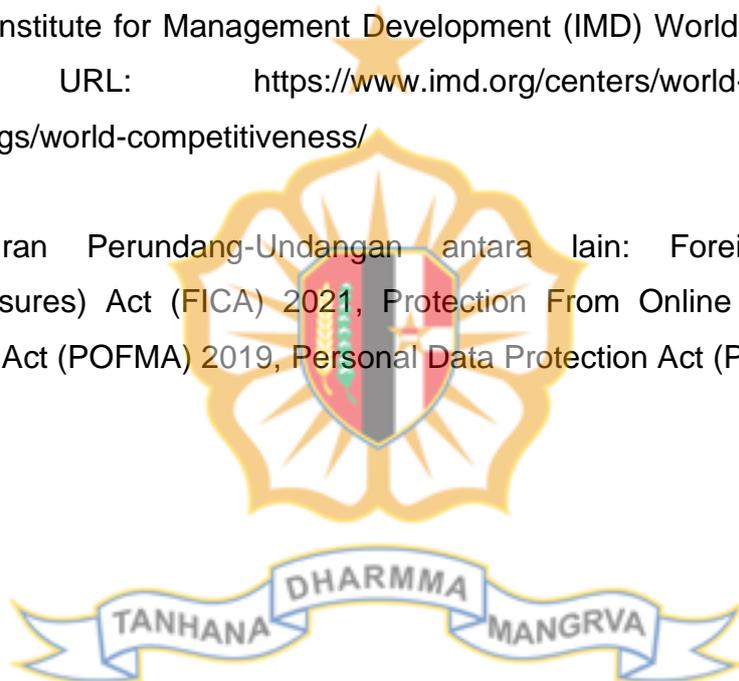
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/information_manipulation_rvb_cle838736.pdf

64. Vilmer, J. B. J. (2021). Fighting Information Manipulation: The French Experience. In *Disinformation and Fake News* (pp. 75-89). Palgrave Macmillan, Singapore.

65. World GDP per capita Ranking 2021. URL: <https://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-capita-ranking.php>

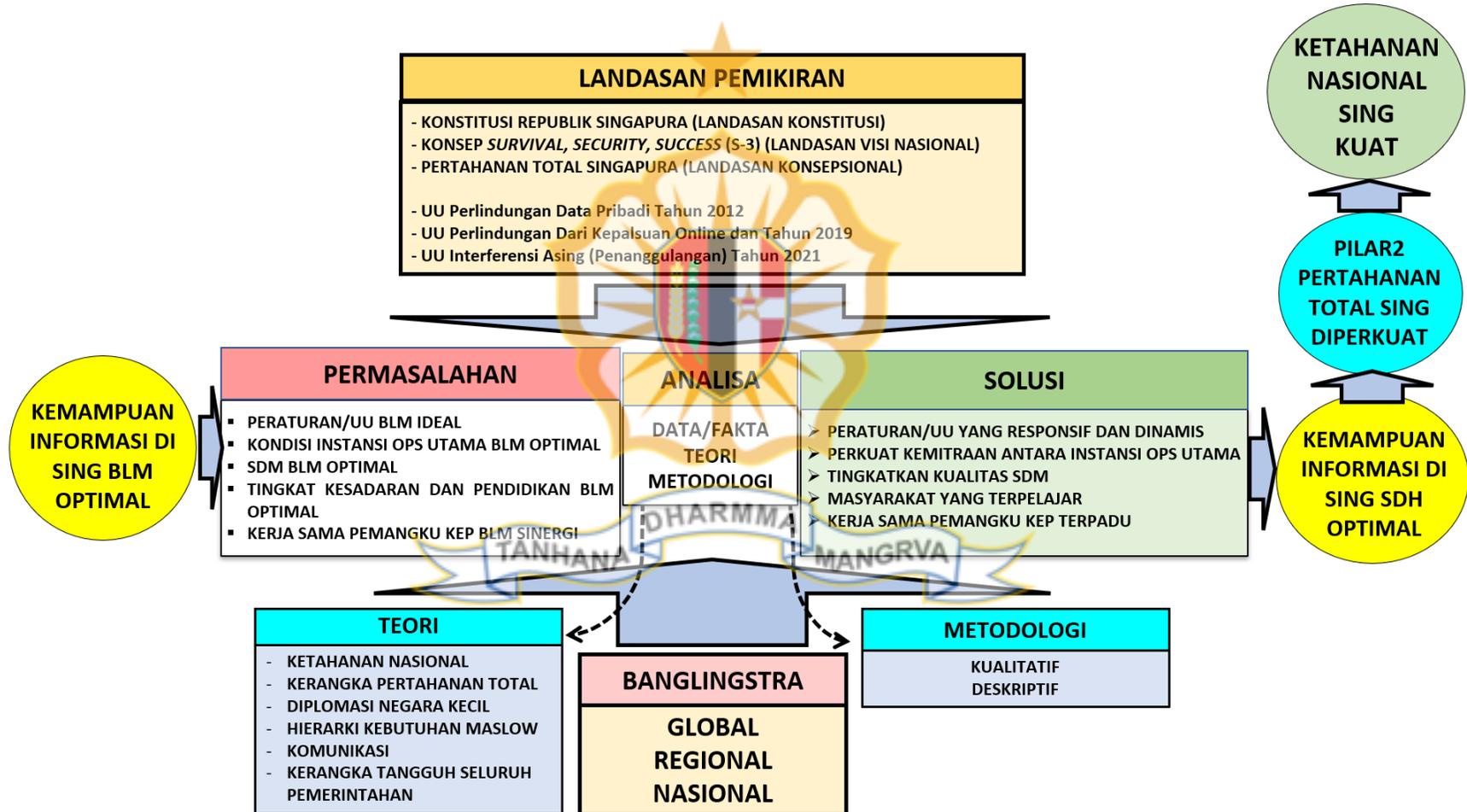
66. 2022 Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Ranking. URL: <https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/>

67. Peraturan Perundang-Undangan antara lain: Foreign Interference (Countermeasures) Act (FICA) 2021, Protection From Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA) 2019, Personal Data Protection Act (PDPA) 2012.



LAMPIRAN A – ALUR PIKIR

PENINGKATAN KEMAMPUAN INFORMASI GUNA MENCEGAH DISINFORMASI DALAM RANGKA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL SINGAPURA



LAMPIRAN B – DAFTAR TABEL

Negara	Perundang-undangan	
	Status	Pihak yang Bertanggung Jawab
Germany	Disetujui	Perusahaan teknologi
Italy	Tertunda	Perorangan, administrator situs web, Penyedia Layanan Internet (ISP), sekolah
The Philippines	Tertunda	Individu dan perusahaan teknologi
Russia	Tertunda	Perusahaan teknologi
USA	Tertunda	Perusahaan teknologi
UK	Tertunda	Perusahaan teknologi
Australia	Sedang berlangsung	Perusahaan teknologi, pengiklan daring, dan pihak lain yang diuntungkan dari disinformasi.
Israel	Tertunda	Perusahaan teknologi
India	Disetujui	Administrator kelompok media sosial
Canada	Sedang beraksi	Media massa

Tabel B-1: Undang-undang Berita Palsu di Seluruh Dunia (per Januari Tahun 2018)



Negara	Tindakan	Status
Qatar	Pemerintah Qatar telah meluncurkan situs web baru yang disebut " <i>Lift the Blockade</i> " untuk melawan berita palsu selama krisis Teluk.	Dilaksanakan
Malaysia	Pemerintah Malaysia telah mengusulkan membuat situs daring (dengan volume lalu lintas web yang tinggi) mendaftar ke Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia	Pending

Negara	Tindakan	Status
	<p>(<i>Malaysian Communications and Multimedia Commission: MCMC</i>).</p> <p>MCMC tersebut telah menyiapkan situs web (<i>Sebenarnya.com</i>) untuk melawan berita palsu. Situs web tersebut melayani audiens berbahasa Melayu dan bertujuan untuk menyanggah berita tidak akurat yang muncul di media sosial.</p>	Dilaksanakan
Republik Ceko (Czech Republic)	<p>Pada Januari 2017, Kementerian Dalam Negeri membentuk unit spesialis bernama <i>Pusat Melawan Terorisme dan Ancaman Hibrid</i> untuk melawan disinformasi yang mengancam keamanan nasional. Platform media sosial seperti Twitter akan digunakan dalam operasinya. Bagian baru dari situs kementerian dalam negeri juga akan didedikasikan untuk mengkomunikasikan pandangan pemerintah. Pusat itu juga akan melatih pegawai negeri untuk menghindari pemerasan dan menolak lobi asing.</p>	Dilaksanakan
Indonesia	<p>Penegakan perundang-undangan yang ada seperti Pasal 156 KUHP dan UU 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada tahun 2015, Polri mengeluarkan Surat Edaran SE/06/X/2015 sebagai pedoman penegakan hukum dalam manajemen operasional penanganan ujaran kebencian. Polisi juga telah membentuk unit bernama <i>Biro Multimedia</i> untuk memantau media sosial dari informasi yang salah. Mandatnya termasuk menyebarkan informasi terkait ketertiban</p>	Dilaksanakan

Negara	Tindakan	Status
	<p>umum serta mendidik pengguna tentang penggunaan media sosial yang pro-sosial. Kementerian Komunikasi RI juga memblokir situs-situs yang kedapatan menyebarkan ujaran kebencian.</p>	
Taiwan	<p>Pada April 2017, Yuan Eksekutif dan Komisi Komunikasi Nasional mengumumkan bahwa mereka ingin menjalin hubungan kerja sama dengan Facebook dan platform media sosial lainnya untuk membangun mekanisme pengecekan fakta. Pemerintah Taiwan juga menggunakan <i>vTaiwan</i>, alat daring untuk melibatkan warga dalam bertukar pandangan tentang cara memerangi disinformasi.</p>	Sedang berlangsung
Italia (Italy)	<p>Pemerintah Italia bekerja sama dengan Facebook dan Google untuk mengajar siswa di 8.000 Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk mengenali berita palsu.</p>	Sedang berlangsung
Swedia (Sweden)	<p>Untuk memberikan keunggulan kompetitif perusahaan media cetak, Pemerintah Swedia telah mengusulkan untuk menghapus pajak atas pendapatan iklan untuk surat kabar harian dan majalah. Mulai Juli 2018 dan seterusnya, kurikulum sekolah Swedia juga akan mengajari siswa cara membedakan sumber yang dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan.</p>	Sedang berlangsung
Finlandia (Finland)	<p>Pemerintah Finlandia telah menyewa konsultan AS untuk melatih pejabat Finlandia untuk mengenali dan menanggapi berita</p>	Dilaksanakan

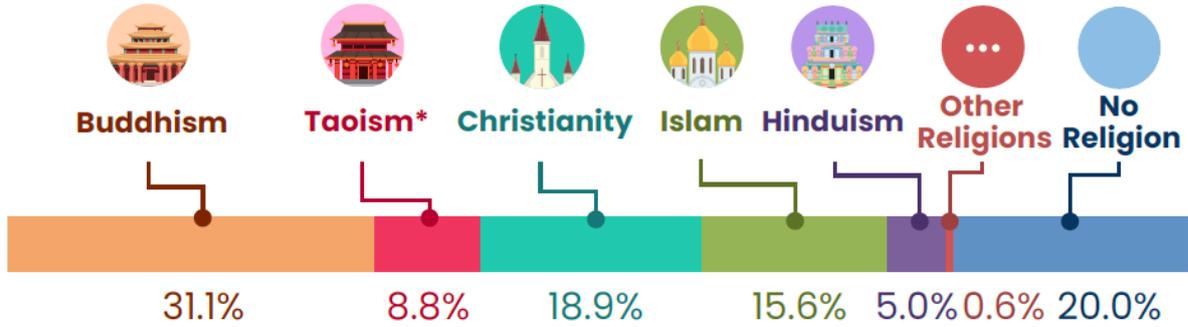
Negara	Tindakan	Status
	palsu. Siswa juga diajarkan membaca berita secara kritis di sekolah.	
Cina (China)	Militer Tiongkok meluncurkan situs web pada November 2017 untuk umum melaporkan kebocoran, berita palsu, dan aktivitas daring ilegal oleh personel militer.	Dilaksanakan
Kanada (Canada)	NewsWise adalah inisiatif untuk membekali siswa Kanada berusia 9 hingga 19 tahun dalam literasi berita.	Dilaksanakan
Amerika Serikat (USA)	Yayasan Sains Nasional telah mendukung proyek seperti <i>ClaimBuster</i> , yang menggunakan nasional teknik pemrosesan bahasa untuk menemukan klaim faktual dalam teks. <i>ClaimBuster</i> telah digunakan untuk memeriksa fakta selama pemilihan presiden AS 2016 dan diskusi Parlemen Australia 2017 tentang topik kepentingan nasional seperti anggaran dan kewarganegaraan.	Dilaksanakan

Tabel B-2: Tindakan yang Diprakarsai Pemerintah terhadap Berita Palsu (per

Januari tahun 2018)⁶⁷

⁶⁷ Hacıyakupoglu, G., Hui, J. Y., Suguna, V. S., Leong, D., & Rahman, M. F. B. A. (2018). *Countering Fake News: A Survey of Recent Global Initiatives*. S. Rajaratnam School of International Studies. URL: https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/03/PR180416_Countering-Fake-News.pdf

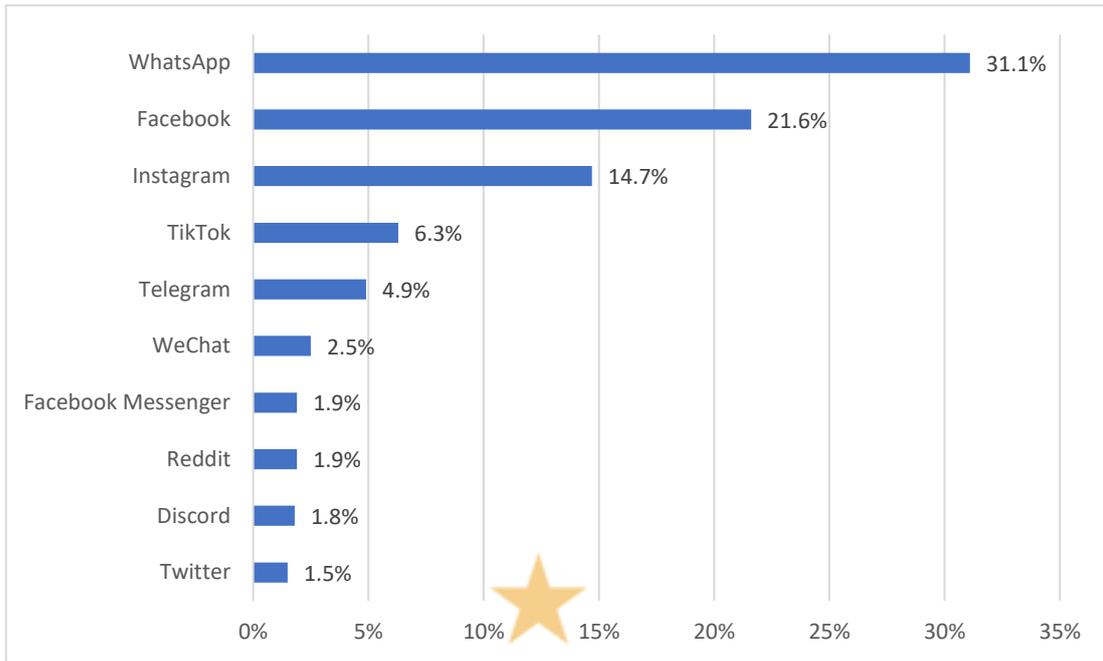
LAMPIRAN C – DAFTAR GAMBAR



Gambar C-1: Ras Etnis yang Berbeda di Singapura (*Department of Statistics, Singapore*)



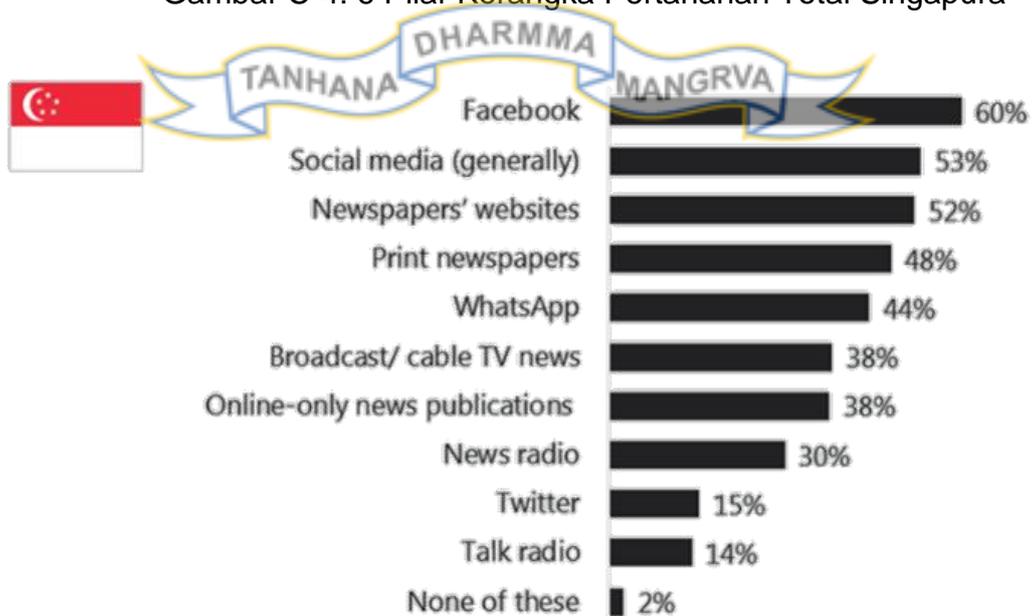
Gambar C-2: Potret Digital Singapura (*Digital 2022: Singapore*)



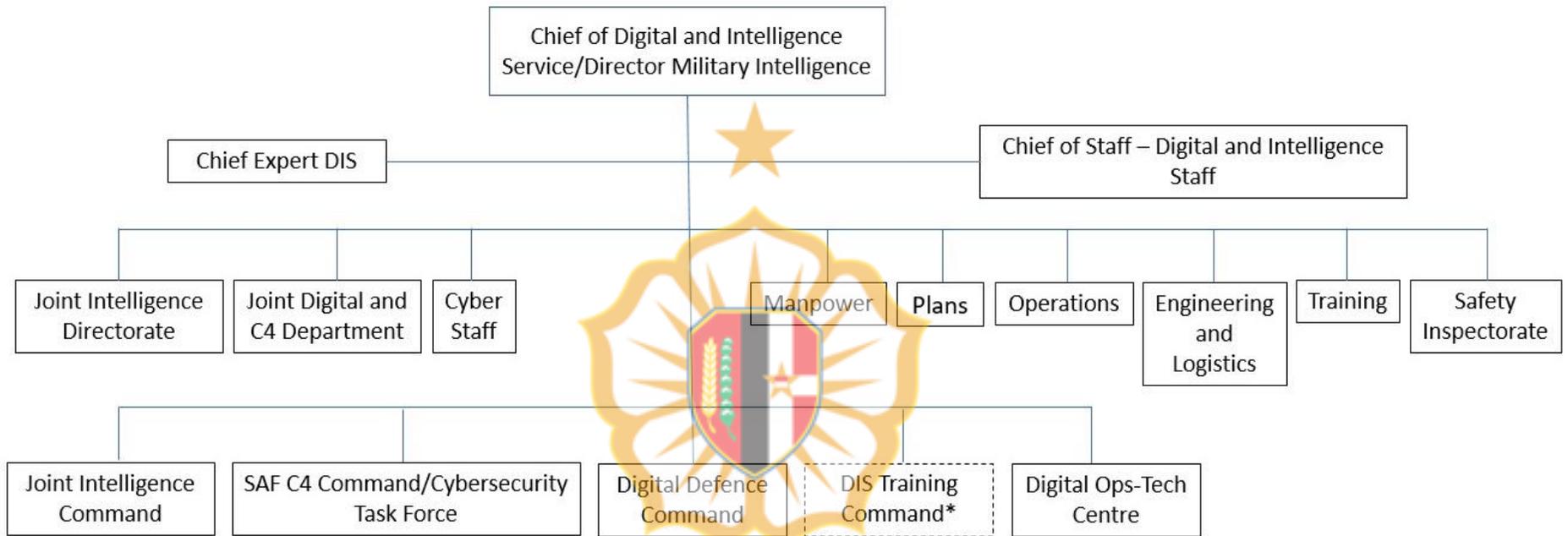
Gambar C-3: Platform Media Sosial Favorit Singapura (*Digital 2022: Singapore*)



Gambar C-4: 6 Pilar Kerangka Pertahanan Total Singapura



Gambar C-5: Media Berita Diakses oleh Warga Singapura



**to be established in 2023*

Gambar C-6: Struktur Organisasi Digital and Intelligence Service (DIS)



LAMPIRAN D – PENGERTIAN

1. **Konsep Pertahanan Total Nasional Singapura**

Konsep Pertahanan Total diperkenalkan pada tahun 1984, dan melibatkan kontribusi dan partisipasi setiap orang Singapura dalam membangun negara yang kuat, aman dan kohesif yang siap menghadapi krisis apa pun, dengan mempertimbangkan ukuran Singapura dan kurangnya sumber daya alam. Pertahanan Total terdiri dari enam pilar, yaitu – Pertahanan Psikologis, Pertahanan Sosial, Pertahanan Ekonomi, Pertahanan Sipil, Pertahanan Militer dan Pertahanan Digital.

2. **Pilar Pertahanan Psikologis**

Pertahanan Psikologis mengacu pada komitmen dan keyakinan setiap warga Singapura terhadap masa depan Singapura. Pilar ini adalah tentang mengembangkan kemauan kolektif untuk membela hak-hak kita; untuk melindungi apa yang menjadi milik kita; untuk berusaha dibiarkan dalam damai; untuk maju dan sejahtera dengan cara kita sendiri sebagai bangsa. Hal ini memungkinkan kita untuk menjaga independensi, keamanan, dan kesuksesan kita.

3. **Pilar Pertahanan Sosial**

Pertahanan Sosial adalah tentang warga Singapura dari semua ras dan agama yang hidup dan bekerja sama secara harmonis. Untuk mencapai hal ini, harus ada toleransi dan rasa hormat ras dan agama, serta kesempatan bagi semua orang tanpa memandang ras, bahasa, atau agama. Pilar ini juga mencakup kepedulian dan kepedulian terhadap mereka yang kurang beruntung dan kurang mampu, untuk berkontribusi pada komunitas dan negara yang lebih besar.

4. **Pilar Pertahanan Ekonomi**

Pertahanan Ekonomi adalah pemerintah, dunia usaha dan industri yang mengatur diri sedemikian rupa sehingga perekonomian kita tangguh dan tidak akan runtuh dalam perang atau krisis apapun. Untuk mencapai hal ini, rencana darurat akan diterapkan untuk memastikan industri kami dapat melanjutkan operasi mereka selama keadaan darurat. Pertahanan Ekonomi melibatkan pembagian sektor

ekonomi sumber daya material dan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan Pertahanan Sipil dan Militer. Hal ini diperlukan untuk membantu perekonomian Singapura tetap kompetitif dan menjaga kepercayaan investor asing.

5. **Pilar Pertahanan Sipil**

Pertahanan Sipil menyediakan keamanan dan kebutuhan dasar warga Singapura sehingga kehidupan dapat berjalan senormal mungkin selama krisis. Ini melibatkan pelatihan penduduk dalam pekerjaan penyelamatan, evakuasi, pertolongan pertama dan pengendalian kerusakan. Pilar ini bertujuan untuk menghasilkan penduduk sipil yang akrab dengan prosedur darurat untuk kelangsungan hidup dan perlindungan, dan dengan pengaturan untuk layanan bantuan dan pasokan darurat barang-barang penting seperti darah, air dan makanan. Kemampuan untuk kembali normal setelah krisis menentukan kekuatan pertahanan sipil.

6. **Pilar Pertahanan Militer**

Pertahanan Militer adalah tentang memiliki SAF yang kuat dan kredibel yang mampu mencegah agresi. Sebuah SAF yang memiliki kemampuan untuk bertindak secara efektif dan tegas, jika pencegahan dan diplomasi gagal, sangat penting untuk membangun Pertahanan Militer yang kuat. Sementara Pertahanan Militer adalah tanggung jawab NSmen, Prajurit Nasional penuh waktu dan tetap di SAF, itu juga melibatkan industri militer kita sendiri yang memiliki kapasitas untuk memenuhi persyaratan senjata dan amunisi SAF.

7. **Pilar Pertahanan Digital**

Pertahanan Digital adalah pilar keenam baru dari Total Defense. Kesadaran yang meningkat akan pertahanan dalam bidang digital sangat penting bagi Singapura dan Singapura mengingat meningkatnya ancaman digitalisasi. Ini adalah upaya seluruh bangsa untuk melindungi dan membela Singapura di ruang digital. Ini mengharuskan warga Singapura untuk (1) mempraktikkan kebiasaan keamanan siber yang baik, (2) waspada terhadap berita palsu dan disinformasi, dan (3) mempertimbangkan dampak tindakan individu mana pun terhadap komunitas.

8. **Joint Intelligence Directorate (JID)**

JID mendukung pengambilan keputusan dan operasi MINDEF/SAF melalui penelitian dan analisis, doktrin, standar, dan praktik terbaik serta integrasi intelijen dan operasi. JID bekerja sama dengan badan-badan intelijen dan Komando Intelijen Gabungan (Joint Intelligence Command: JIC) di bawah naungan Organisasi Intelijen Militer (Military Intelligence Organisation: MIO).

9. **Joint Digital and C4 Department (JDCD)**

JDCD mengarahkan digitalisasi SAF dengan mengembangkan strategi digital, rencana induk, dan tata kelola sumber daya, mendefinisikan dan mengukur pertumbuhan digital, serta meningkatkan literasi digital untuk menciptakan tenaga kerja yang siap pakai secara digital. JDCD juga bermitra dengan Komunitas Teknologi Pertahanan (Defence Technology Community: DTC) untuk mendorong dan mengembangkan standar teknis dan tata kelola untuk produk digital SAF guna memastikan kelincahan, interoperabilitas, skalabilitas, keamanan, dan keberlanjutan.

10. **Cyber Staff**

Cyber Staff memimpin dan mengoordinasikan keamanan siber di seluruh sektor pertahanan. Staf Siber mengembangkan strategi dan kebijakan pertahanan siber, mengatur pengembangan kemampuan untuk pertahanan siber, dan mendukung Badan Keamanan Siber (Cyber Security Agency: CSA) Singapura jika diperlukan.

11. **Joint Intelligence Command (JIC)**

JIC mendukung MINDEF dan kebutuhan intelijen SAF. JIC menyediakan intelijen yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk membantu peringatan dini dan pengambilan keputusan operasi SAF jika diperlukan. JIC, yang terdiri dari Markas Besar dan dua kelompok yang setara dengan Brigade, Imagery Support Group (ISG) dan Counter-Terrorism Intelligence Group (CTIG), ditugaskan untuk meningkatkan, melatih, dan mempertahankan personel intelijen untuk DIS.

12. **SAF C4 Command / Cybersecurity Task Force (SAFC4COM / CSTF)**

SAFC4COM / CSTF mengoperasikan dan melindungi kemampuan Komando, Kendali, Komunikasi, dan Komputer (C4) untuk MINDEF/SAF. SAFC4COM / CSTF, yang terdiri dari dua kelompok setara Brigade, Kelompok Operasi C4 (C4OG) dan Kelompok Pertahanan Siber (CDG), bekerja bersama sebagai pasukan berjejaring dan terintegrasi untuk mendukung spektrum penuh operasi SAF. Mereka juga ditugaskan untuk meningkatkan, melatih, dan mempertahankan personel C4 dan siber untuk SAF.

13. **Digital Defence Command (DDC)**

DDC mengembangkan kemampuan perlindungan elektronik dan pertahanan psikologis bagi MINDEF/SAF untuk mengatasi ancaman dan tantangan keamanan yang terus berkembang. DDC mengeksplorasi dan memperkenalkan langkah-langkah perlindungan elektronik dan ketahanan psikologis yang sesuai untuk SAF, serta membantu menggabungkan langkah-langkah yang diperlukan dalam fungsi sehari-hari Dinas SAF lainnya. DDC terdiri dari sub-unit, Kelompok Perlindungan Elektronik (Electronic Protection Group: EPG) dan Kelompok Pertahanan Psikologis (Psychological Defence Group: PDG), yang berfokus pada pengembangan kemampuan dalam domain masing-masing.

14. **DIS Training Command (DTCOM)**

DTCOM akan bertanggung jawab atas pengembangan tenaga kerja DIS, dengan sekolah pelatihan untuk pelatihan kejuruan dan pelatihan kompetensi tingkat lanjut di bidang intelijen dan siber, serta fungsi staf untuk berbagai pengembangan kurikulum dan dukungan pelatihan. DTCOM diharapkan akan didirikan pada tahun 2023.

15. **Digital Ops-Tech Centre (DOTC)**

DOTC memungkinkan SAF untuk mengembangkan respons yang gesit guna memenuhi persyaratan operasional yang berubah di perbatasan digital, sembari mengembangkan inti digital yang berpengalaman dalam ilmu pengetahuan data dan teknologi AI untuk mempertajam keunggulan operasional SAF. Sebagai pusat keunggulan SAF untuk keahlian digital, DOTC bermitra dengan Komunitas

Teknologi Pertahanan (Defence Technology Community: DTC), agensi digital di seluruh pemerintahan, lembaga akademik, dan pakar industri untuk terus mendapatkan informasi terbaru tentang praktik terbaik dalam pendekatan dan budayanya. Selain mengembangkan pakar digital SAF melalui skema C4 Experts dan Digital Specialist, DOTC juga mempromosikan bimbingan dan menumbuhkan lingkungan untuk inovasi dan kolaborasi dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh unit operasional SAF.



LAMPIRAN E – DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama dan Gelar : **WONG MINGJIE**
2. Pangkat/Corps/NRP : **KOLONEL / AIR FORCE / 074F**
3. Tempat/Tgl lahir : **Singapura / 24 Mei 1981**
4. Jabatan : **Kepala Pusat Informasi Angkatan Udara Singapura**
5. Alamat Rumah : **336 Pasir Panjang Road, Singapore 118668**

6. Riwayat pendidikan:

Umum

- a. 2017, Master of Mass Communication, Wee Kim Wee School of Communication and Information, Nanyang Technological University, Singapore
- b. 2014, Master of Military and Defence Studies, Australian National University, Australia
- c. 2004, Bachelor of Engineering in Aeronautical Engineering (Honours Class 2 Division 1) (Engineering), University of New South Wales, Australia

Militer

- d. 2014, Australian Defence Force Command & Staff Course, Canberra, Australia
- e. 2007, RSAF Advanced Officer Course, Singapore
- f. 2007, Tri-Service Warfighter Course, Singapore
- g. 2006, Basic Military Technology Appreciation Course, Course
- h. 2001, Australian Defence Force Academy, Canberra, Australia

7. Jabatan yang pernah dipangku antara lain:
- a. 2021 – 2022: Head Air Force Information Centre, RSAF
 - b. 2020-2021: Deputy Director (Communications Strategy and Technology), Information Directorate, MINDEF
 - c. 2018-2020: Deputy Director (Communications Research), Information Directorate, MINDEF
 - d. 2015-2017: Squadron Commanding Officer, Unmanned Aerial Vehicle Command, RSAF
 - e. 2008-2013: S3 and Officer Commanding, Unmanned Aerial Vehicle Command, RSAF
 - f. 2006-2008: Staff officer, Joint Plans and Transformation Department, MINDEF

